

**PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH DI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
DALAM STUDI KASUS PUTUSAN AKTA CERAI
NOMOR: 0110/AC/2017//PA.PLK TANGGAL 5 APRIL 2017.**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Disusun Oleh:

IMAM SAHROFI
NIM. 160 140 29

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1440 H/2018 M**

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL :PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN
TENGAH DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA
RAYA DALAM STUDY KASUS PUTUSAN AKTA
CERAI NOMOR :0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL
5 APRIL 2017 M.

NAMA : IMAM SAHROFI

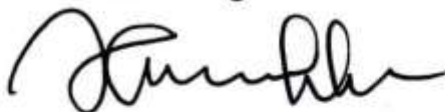
NIM : 160 140 29

JENJANG : STRATA 2

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Palangka Raya, November 2018
Menyetujui

Pembimbing I



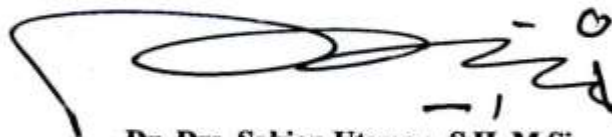
Dr. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Dr. Sapiani, M.H
NIP. 196501011998031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si.
NIP.196311091992031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK tertanggal 5 April 2017 M.

Ditulis Oleh : Imam sahrofi

NIM : 16014029

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program Studi Magister Hukum Keluarga.

Palangka Raya, November 2018
Direktur

Dr. Sardimi, M. Ag
NIP. 1956801081994021001

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM STUDY KASUS PUTUSAN AKTA CERAI NOMOR : 0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL 5 APRIL 2017 M. Oleh Imam Sahrofi NIM 160 140 29 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2018 M/7 Rabiulawal 1440 H

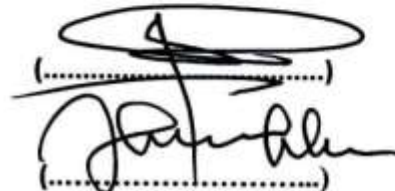
Palangka Raya, November 2018

Tim Penguji

1. Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
Ketua sidang/Anggota
2. Dr. Elvie Soeradji, M.H.I
Anggota
3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Anggota
4. Dr. Sadiani, M.H
Sekertaris/Anggota



(.....)




(.....)



(.....)

Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya



Dr. H. Sardimi, M. Ag
NIP. 1956801081994021001

ABSTRAK

Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia ada ketentuan yang mengatur bagi anggota Polri yang akan menikah ataupun ingin bercerai harus adanya surat rekomendasi atau ijin dari pimpinan, tetapi dalam penelitian ini justru ada anggota Polisi Polda Kalteng yang bercerai dapat diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya, adapun yang menjadi latar belakang anggota polri bercerai tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan/pimpinan, alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan dan akibat hukum perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif tentang Perceraian Bagi Anggota Polri Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017/PA.PLK, yang mengarah pada pemahaman lebih luas tentang bagaimana cara bagi anggota polri melaksanakan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dalam penelitian peneliti terjun langsung kelapangan, mencari informasi terhadap 5 informan baik anggota Polri dan Pegawai Pengadilan Agama Palangka raya, keterangan dan hasil-hasil pengamatan lainnya tentang Perceraian bagi Anggota Polri.

Hasil penelitian bahwa latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa adanya Rekomendasi/ijin cerai dari pimpinan adalah tidak segera ditindak lanjuti oleh pimpinan satuan kerja, ada anggota Polri Polda Kalimantan Tengah yang mengajukan ijin cerai, dengan tujuan agar niat bercerai anggota Polri dapat dibatalkan dan dilakukan mediasi.

Alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan karena setiap menerima perkara gugatan dan permohonan harus ditindak lanjuti, karena bukan persyaratan yang mutlak dalam perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan, anggota SM jelas melanggar pasal 33 perkap No. 9 tahun 2010, Pelanggaran terhadap Perkapolri, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomer 2 tahun 2003 tentang disiplin Anggota Polri yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, Hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kata Kunci : Perceraian, Anggota, Kepolisian

ABSTRACT

Indonesianrepubliks police have provisions regulating for police officers who are going to get married or want to get divorced, there must be a recommendation letter or permission from the leaders, but in this study there are actually Central Kalimantan regional police officers who are divorced and can be processed in the Palangka Raya religious court. The background of police officers divorced without recommendations from their leaders, the reason fromPalangkaRaya religious court can processes divorce from members of the national police who do not get recommendations from their leaders and due to the law of divorce from members of the policeofficers who do not get recommendations from their leaders.

This study used a normative approach concern of divorce for members of the Central Kalimantan regional police at the Palangka Raya religious court in a case of study on divorce deeds number: 0110 / AC / 2017 // PA.PLK, which leads to a broader understanding of how can police members can carry out divorce in the Palangka Raya religious court. In this study, researchers went directly of searching for information, on 5 informants from the police and from the employees of the Palangka Raya religious court, information and other observations about divorce for members of the national police.

The results of the study showed that the backgrounds of the police officers members can divorced in the Palangka Raya religious court without any recommendation / divorce permit from the leaders was not immediately followed up by the head of the work intending that the intention to divorce from the police members can be canceled and mediated.

The reasons from Palangka Raya religious court to proceed divorce from members of the national police who did not get a recommendation from the leaders is because every case and petition must be followed up, and because it is not an absolute requirement for divorce according to the Republik of Indonesia article 19 number 9 of 1975 concerning the implementation of number law 1 of 1974 concerning marriage.

The consequence of the law for police members who did not get a recommendation divorce from the leaders, members of SM clearly violated article 33 PERKAP no.9 of 2010, violations of PERKAPOLRI, including divorce without permission from leaders, then sanctions will be imposed in accordance with government regulation number 2 of 2003 regarding Polri member discipline, disciplinary penalties in the form of written reprimand, postponement of education for a maximum of one year, periodic salary delays, postponement of promotions for a maximum of one year, demotion transfers, exemption from office and placement in a special place for a maximum of twenty one day.

Keywords: divorce, police members

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM STUDY KASUS PUTUSAN AKTA CERAI NOMOR : 0110/ AC/2017/ PA.PLK TANGGAL 5 APRIL 2017 M”.

Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad *Shalallahu'alaihi Wa Sallam*, utusan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah Swt meridhai para sahabat dan tabi'in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah Swt juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak di hari akhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Bapak Dr. H. Sardimi, M. Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus

memajukan dan mengembangkan Pascasarjana ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag dan Dr. Sadiani, MH., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah SWT membalasnya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Prodi MHK, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah Swt menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Penulis cintai dan sayangi Istri Tercinta Mulhimah, HM, M.PdI, Anak tercinta Syahril Mulya Nugroho dan Muhammad fadhil Zaky Mubarak yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar.
7. Yang penulis sayangi seluruh keluarga penulis, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis.
8. Sahabat-sahabat MHK 2016 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Pascasarjana baik dari MPI, Mesy, dan MPAL, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, November 2018

Penulis,

Imam Sahrofi
NIM. 160 140 29



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK tertanggal 5 April 2017 M adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Amam Sahrofi
NIM. 160 140 29

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At Tahrir : 6)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'aqqidi>n</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al- au>liya>'</i>
---------------	---------	--

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis

t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bai>nakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qau>lun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī> al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i> }

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TESIS	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	7
1. Kumpulan Teori.....	7
a. Teori Kebijakan	9
b. Teori Disiplin.....	12
c. Teori Kewenangan.....	19

d. Teori maslahat	28
2. Perceraian Bagi anggota Polri.....	38
a. Pengertian-pengertian	38
1) Pengertian Perceraian.....	38
2) Pengertian anggota Polri	44
b. Sebab-sebab terjadinya Perceraian	46
c. Prosedur Perceraian Bagi Anggota Polri	49
d. Proses Perceraian Anggota Polri di Pengadilan Agama.....	56
1) Pengertian Pengadilan Agama.....	57
2) Proses Perceraian di Pengadilan Agama.....	61
e. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.....	64
B. Penelitian Terdahulu	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	72
1. Pendekatan Penelitian.....	72
2. Jenis Penelitian	73
B. Data dan Sumber Data	73
1. Data	73
2. Sumber Data	73
C. Prosedur Pengumpulan Data	74

D. Analisis data	76
E. Pengecekan Keabsahan Data	77
 BAB 1V. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
1. Gambaran umum Polda Kalimantan Tengah.....	79
a. sejarah singkat berdirinya Polda Kalteng.....	79
b. visi dan Misi Polda Kalteng.....	83
2. Gambaran Pengadilan Agama Palangka Raya.....	96
a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Palangka Raya.....	96
b. visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	101
B. Penyajian data dan analisis	109
1. Latar belakang anggota Polri Bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya.....	109
a. Belum mendapatkan ijin dari pimpinan.....	109
b. Lamanya respon/tindak lanjut terhadap ijin cerai yang diajukan oleh anggota Polri ke pimpinan.....	111
c. Adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri SM sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga.....	118
2. Alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan.....	123

a. Kewajiban menindaklanjuti perkara oleh Pengadilan Agama Palangka Raya	123
b. Adanya surat pernyataan pemohon.....	130
c. Ijin perceraian sebagai Adminitrasi sedangkan putusan perceraian terkait masalah hukum perdata.....	134
3. Akibat Hukum Perceraian bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan.....	138
a. Pelanggaran terhadap aturan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dapat dikenakan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Polri.....	138
b. Hak-hak anggota tidak diberikan selama masih dalam proses pelanggaran.....	143
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	145
B. Rekomendasi.....	146
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya Suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar dan tidak ada masalah, bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Jika kebencian sudah datang menimpa pasangan rumah tangga, terkadang suami istri tidak bisa mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi untuk memulihkan kasih sayang mereka. Hal itu berdampak pada keretakan rumah tangga yang mengarah pada terjadinya perceraian. Kenyataan dari fenomena perceraian yang terjadi dalam masyarakat, menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, adakalanya cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber dari timbulnya bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena factor-faktor lain yang menyebabkan salah seorang dari suami istri terjadi perceraian.

Hukum Islam dan juga Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pleksebelitas mengatur persoalan ini, artinya perceraian bisa terjadi dan tidak dilarang oleh kedua hukum tersebut apabila kedua belah pihak suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan eksitensi rumah tangganya. di Indonesia untuk membuktikan pasangan suami istri yang tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, untuk mendapat legalitas terjadinya perceraian, maka harus melalui prosedur persidangan di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Selain itu, ada kekhususan bagi Aparatur Sipil Negara,TNI dan Polri, jika ingin melakukan perceraian maka harus

mendapat rekomendasi dari pimpinan. Sebagai contoh bagi anggota Kepolisian Polda Kalteng, dengan dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.¹

Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan perceraian tanpa seizin pimpinan (atasan), maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik Kode Etik Profesi Polri atau Pelanggaran Disiplin Polri.

Pada ketentuan peraturan Kapolri di atas, ternyata ada beberapa oknum anggota Polda Kalimantan tengah yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak melalui prosedur izin dari atasan, melainkan langsung mengajukan proses perceraianya. Hal ini sebagaimana penulis temui pada hasil Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK tertanggal 5 april 2017 M. dari fenomena ini menarik perhatian penulis dan mempertanyakan kenapa anggota Polri yang melakukan perceraian tanpa mendapat rekomendasi dari atasan bisa diproses perceraianya di Pengadilan Agama Paalangka Raya. Hal ini menggambarkan ketidak sinkronan antara ketentuan instansi yang ada di Polri dengan instansi Pengadilan Agama.

¹Perkap no. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota polrihu.

Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa anggota yang ingin mengajukan gugat cerai harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari atasannya. Artinya jika anggota yang ingin bercerai tidak melampirkan surat rekomendasi dari atasannya atau tidak melengkapi berkas perceraian yang diajukan ke pengadilan agama tersebut, maka pihak pengadilan agama seharusnya menolak permohonan tersebut. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis mengangkat judul tesis. **Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK tertanggal 5 April 2017 M.**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada persoalan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi Anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa mendapat rekomendasi dari atasan ?
2. Mengapa Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan?
3. Bagaimana akibat Hukum perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Apa yang melatar belakangi Anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa mendapat rekomendasi dari atasan ?
2. Untuk mengetahui dan memahami Mengapa Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan?
3. Untuk mengetahui Bagaimana akibat Hukum perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan?

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, untuk memperkaya keilmuan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya, dan Pasca Sarjana khususnya Program Study Magester Hukum Keluarga (MHK). sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa serta masyarakat sekitarnya. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Bagian Perawatan Personel Biro SDM dan Polda Kalteng pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja antar instansi Polda Kalteng dengan Pengadilan Agama Palangkaraya.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu pedoman bagi anggota Polda Kalteng maupun Pengadilan Agama Palangkaraya yang bertugas menangani perceraian bagi Anggota Polri.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu, sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan teori-teori yaitu teori kebijakan, teori Desiplin, Teori Kewenangan, Teori Masalah, perceraian anggota polri, pengertian perceraian, pengertian anggota Polri, sebab-sebab terjadinya perceraian, prosedur perceraian bagi anggota Polri, proses perceraian anggota Polri di Pengadilan agama, proses perceraian di Pengadilan agama, Kewenangan Pengadilan agama dalam perkara perceraian dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian yaitu Mengenai pendekatan dan Jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian, pada bab ini dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat berdirinya Polda Kalimantan Tengah, visi dan misi Polda kalteng, gambaran Pengadilan agama palangka raya, sejarah singkat Pengadilan agama Palangka raya, visi dan misi Pengadilan Agama Palangka Raya, penyajian data dan Pembahasan Hasil Penelitian yang melatar belakangi anggota polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan, mengapa Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan dan bagaimana akibat hukum perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan.

BAB V : Penutup, pada bab ini memaparkan masalah Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kumpulan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Kebijakan, Teori Disiplin, Teori Kewenangan dan Teori Maslahat. Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan.² Adapun kompetensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. dalam hal kompetensi Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.³

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara

²Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.

³*Ibid.*, h. 27.

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.⁴

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi, dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolute, yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Pada distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relative, atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.⁵ Adapun menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) dan kompetensi relative (kewenangan relative). Kompetensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang -undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap - tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.⁶

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu

⁴*Ibid.*, h. 28

⁵R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), h. 7,

⁶R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung; Bina Cipta, 1987), h. 23

perkara. Kompetensi Absolut itu sendiri adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

Menurut Subekti sendiri, untuk membedakan kompetensi absolute dan relatif sebuah lembaga peradilan dapat dilihat dari undang - undang yang mengaturnya. Kompetensi absolute dapat ditinjau dalam undang-undang Pokok Kehakiman, sedangkan kompetensi relatif dapat ditinjau dari undang-undang hukum acara lembaga peradilan tersebut.

a. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ada beberapa teori diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain 3 pendapat tentang teori kebijakan diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

- 1) Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
- 2) Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat

tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah

- 3) Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
- 4) Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- 5) Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- 6) Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
- 7) Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Hal ini perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak sekali hal-hal yang tersirat (kontekstual) yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni publik/ kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Kelembagaan pertimbangan hakim, teori efektivitas hukum, teori politik hukum, teori kebebasan hakim. Berkaitan dengan teori Pertimbangan hakim dalam teori ini, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*).

b. Teori Disiplin

Teori disiplin merupakan makna kata disiplin yang memang mudah diucapkan tapi kadang sulit untuk diterapkan. berikut ini, saya akan menguraikan definisi atau pengertian dari disiplin.

Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Disiplin itu mempunyai 3 aspek sebagai berikut:

- a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- b. Pemahaman yang baik mengenai sistem atauran perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan.
- c. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib.⁷

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.⁸

Dalam peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

⁷ Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, h.449

⁸ Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil

sebenarnya terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Keith Avis mengemukakan bahwa: *“discipline is management action to enforce organizational standards”*, pengertian disiplin tersebut diinterpretasikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. dalam suatu organisasi atau lembaga pengertian ini pada dasarnya merupakan pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat kepada ketentuan/peraturan/norma yang berlaku. dalam hubungannya dengan disiplin Pegawai, disiplin merupakan unsur pengikat, unsur integrasi dan merupakan unsur yang dapat menggairahkan kerja pegawai, bahkan dapat pula sebaliknya.

Berpedoman pada definisi di atas maka disiplin menjadi faktor pengikat dan integrasi, yaitu merupakan kekuatan yang dapat memaksa pegawai untuk mematuhi peraturan serta prosedur kerja yang telah ditentukan terlebih dahulu, karena dianggap bahwa dengan berpegang pada peraturan ini, tujuan dari organisasi tercapai. pada suatu pelanggaran dari peraturan, maka dengan sendirinya seorang pegawai atau sekelompok pegawai dapat di hukum, yaitu karena telah melakukan pekerjaan yang dilarang dan telah berbuat bertindak tidak sesuai peraturan dan prosedur tata kerja yang berlaku dalam organisasi. Kata disiplin berasal dari bahasa latin yang berarti mengajar atau belajar. Akan tetapi secara tradisional, disiplin dianggap sebagai kegiatan negatif yang bertujuan untuk menghukum para karyawan yang tidak berhasil mematuhi standar organisasi. sedangkan pandangan manajemen modern

⁹ Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

melihat disiplin sebagai suatu kesempatan konstruktif untuk memperbaiki ketimbang menghukum perilaku seseorang.

Pada ensiklopedia nasional indonesia, disebutkan bahwa “disiplin adalah suatu sikap yang menunjang kesediaan untuk menepati atau memenuhi dan mendukung ketentuan dan tata tertib, peraturan, nilai serta kaidah yang berlaku”.¹⁰

Menurut Handok, “disiplin adalah suatu kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. dalam hal ini ada dua tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu preventif dan korektif”. ini sejalan dengan mangkunegara (1991), yang memberi batasan pengertian disiplin kerja dalam dua macam bentuk, yaitu:

- 1) Disiplin preventif, yaitu suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah di gariskan oleh perusahaan.
- 2) Disiplin korektif, adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.

Secara preventif pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan organisasi. pimpinan perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang ada dalam organisasi, jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah dalam menegakkan disiplin kerja.

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org> > wiki> disiplin

pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. disiplin korektif memerlukan perhatian khusus dan proses prosedur yang seharusnya. pernyataan davis tersebut menjelaskan bahwa disiplin korektif memerlukan perhatian proses yang seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukkan pegawai yang bersangkutan benar-benar terlibat. keperluan proses yang seharusnya itu adalah Suatu prasangka tak bersalah sampai membuktikan bahwa pegawai benar-benar berperan dalam suatu pelanggaran hak untuk didengar dalam beberapa kasus yang diwakili oleh pegawai lain dan disiplin itu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pelanggaran yang melibatkannya.

Secara spesifik memberikan pengertian tentang disiplin kerja merupakan disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Nitisemito, mengemukakan dua pengertian kedisiplinan, yakni dalam arti sempit dan arti luas. “dalam arti sempit dikatakan bahwa kedisiplinan adalah bilamana karyawan tersebut jarang absen dan datang serta pulang tepat pada waktunya. sedangkan dalam arti luas kedisiplinan di artikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak”.

Pengertian yang hampir sama dan lebih rinci juga dikemukakan oleh hasibuan, sebagai berikut: “kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. jadi dia akan mematuhi semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak”.

Atmosudirdjo mengemukakan tentang pengertian disiplin dan aspek disiplin sebagai berikut: “disiplin merupakan suatu bentuk ‘ketaatan’ dan ‘pengendalian’ erat hubungannya dengan rasionalisme, dan oleh karena itu merupakan suatu ketaatan atau pengendalian diri yang rasional, sadar penuh, tidak memakai perasaan, sehingga tidak emosional. Disiplin mempunyai tiga aspek, yaitu:

- 1) Suatu sikap mental (*state of mind, mental attitude*) tertentu, yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil daripada “latihan dan pengendalian pikiran dan watak” (*training and control of mind and character*) oleh pemimpin secara tertentu.
- 2) Suatu pengetahuan (*knowledge*) tingkat tinggi tentang sistem aturan-aturan perilaku (*system or rules of conduct*), sistem atau norma-norma, kriteria dan standar-standar (*system or set of norms, criteria and standards*) sedemikian rupa sehingga “pengetahuan” tersebut menimbulkan sekali wawasan (*insight*) dan kesadaran (*consciousness*), bahwa ketaatan akan aturan-aturan, norma-norma, kriteria, standar-

standar, struktur dan sistem organisasi dan sebagainya itu adalah syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mencapai keberhasilan.

- 3) Suatu sikap kelakuan (*behavior*) yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, pengertian, dan kesadaran untuk mentaati segala apa yang diketahui itu secara cermat dan tertib.

Pengertian dan aspek disiplin tersebut diatas penulis berpendapat bahwa untuk pelaksanaan disiplin yang baik setiap aturan-aturan disiplin perlu diketahui, dipahami, diingat dan ditaati untuk dilaksanakan oleh setiap anggota atau pegawai. organisasi dalam melangsungkan hidupnya melalui kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi pada umumnya dilakukan secara dini, dan keberhasilan organisasi tersebut mutlak tergantung antara lain dari disiplin kerja yang kuat pada semua lapisan dalam organisasi. termasuk aturan-aturan kesopanan yang bersifat umum (yang biasanya merupakan bagian daripada adat) perlu diketahui dan ditaati agar supaya kita tidak disebut kurang ajar atau tidak sopan.

Dalam al-quran surah An-nisa' ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, ”(Q.S.An-Nisa:59)¹¹

c. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, emerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹²

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris , yaitu authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa jermanya, yaitu theorie der autaritat, teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹³

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁴

¹¹ Al-qur'an dan terjemahanya

¹² Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di*

Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35

¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

¹⁴ Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hal 26

Teori kewenangan, Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ -organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ -organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara organ - organ Negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “Kewenangan Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Menurut Philipus Hadjon mengatakan, kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.¹⁵ Adapun Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan

¹⁵.Philipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara*, (Jogjakarta: UGM Pers, 2008), h. 130.

keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.¹⁶

Pengertian Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan Hukum Tata Negara. Pada kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.¹⁷

Kewenangan organ-organ Negara harus di dasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang -undangan yang berlaku, baik itu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ Negara tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif. Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, H.D Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt, seperti yang di kutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mendefinisikan sebagai berikut;

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang -undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.

¹⁶Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2006), h. 217.

¹⁷*Ibid.*, h. 218.

- 3) Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain atas namanya.¹⁸

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”²⁰, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²¹

¹⁸Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 105.

¹⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36

²⁰Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), h. 30

²¹A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52

Hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan²² Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan.²³

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁴

Supaya kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.²⁵ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek

²²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,t.t, h. 1.

²³Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 35

²⁵Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, h. 39

hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁶Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, h. 20

²⁷Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸ Pengertian wewenang menurut H.D. Stout itu sendiri adalah *“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*.²⁹

Beberapa pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi

²⁸Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

²⁹Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 4.

mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁰

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama di samping sebagai pegawai negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:” Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³¹

d. Toeri Maslahat

³⁰ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

³¹ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 *tentang kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat 1

Kata masalah yang dalam bahasa Indonesia di kenal dengan maslahat, berasal dari bahasa arab yaitu masalah. Masalah secara bahasa atau etomologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik,kebaikan, guna atau kegunaan.³²

Muhammmad Mustafa Syalabi mengemukakan penjelasan bahwa Al Masalah adalah suatu bentuk yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya keadaan masalah pada pena adalah untuk menulis. Selain itu akibat dari perbuatan yang melahirkan masalah juga di sebut al-maslahah dalam hal ini, dalam pemakaian kata al-maslahah dalam perbuatan tersebut bersifat majaz.³³

Menurut Imam Al-Ghajali pada dasarnya Al-maslahah adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan, akan tetapi, bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dan mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan tujuan syara'.

Dari uraian Al-Ghazali dapat di pahami bahwa al-maslahah dalam pengertian Syar'I ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawitanpa

³² Departemen Pendidikan dan kebudayaan , *kamus besar bahasa Indonesia* , Balai Pustaka Jakarta 1996.h.634

³³ H juhaya s.praja , *Teori Hukum dan Aplikasi*, CV Pustaka Setia, 2011, h,154

mempertimbangkan syara'. Apabila bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan al-maslahah tetapi merupakan mafsadah.³⁴

Pada kerangka pikir, sebuah pernyataan dapat dikatakan membangun teori jika terdiri dari *set of law*, *axiomatic*, dan *causal processes*. Sebagai puncaknya sebuah teori harus memenuhi kriteria, *abstractness* (secara ontologi), kemudian *intersubjectivity* (Epistemologi) dan *empirical relevance* (secara aksiologi) maksudnya adalah teori merupakan sebuah perangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat, dan puncaknya adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. AM. Laot Kian, *Berkelana dalam Filsafat Hukum*.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermamfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan

³⁴ Ibid.h.155

yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dinggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dalam kerangka menegakkan kebenaran dan nilai keadilan dalam masyarakat, pada diri hakim di emban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosicial justice*).

Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materil) yang sesuai dengan hati nurani hakim. Wildan Suyuti Mustafa menyatakan Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih jelas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu”.

Pertimbangannya hakim juga menggunakan pendekatan Seni dan Intuisi, penjatuhan putusan yang oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan putusan yang wajar bagi pihak yang berperkara. Kemudian hakim menggunakan pendekatan keilmuan titik ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

Landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi yang berperkara.

Sehubungan dengan teori Efektivitas Hukum peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Anthony Allot menyatakan hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum

dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang diperhatikan dalam penegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu adalah:

- 1) Faktor hukum atau undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas dapat dipahami bahwa penagakkan hukum tidak akan dicapai apabila tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Selain itu penulis juga mengkaji teori politik hukum, dimana penulis memaparkan beberapa pendapat para ahli untuk sampai pada pemahaman, agar bisa menentukan arah kehendak pertimbangan hakim, Mochtar Kusuma Atmadja mendefinisikan politik hukum (*rechts politiek*) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara itu.³⁵

³⁵ Ibnu Elmi AS.Pelu,*Teori Politik Hukum*(Desertasi,2010) lihat buku Bintang Ragen Saragih, 2006. *Politik Hukum*. Bandung, Utomo, hlm.22-23

Berdasarkan ruang lingkup politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja dan Mahfud MD tersebut mengantarkan kepada pengertian tentang politik hukum yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kemana arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika masyarakat secara luas.³⁶ Seyogyanya dasar hukum peradilan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang oleh Gustaf Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar tersebut adalah keadilan atau *gerechtigkeiteit*, kemanfaatan atau *zweckmaeszikeit*, serta kepastian hukum atau *rechtssicherheit*.³⁷

Kebebasan hakim itu sendiri adalah landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang 48 tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga

³⁶. Ibnu Elimi AS. *Pelu, teori Politik Hukum* (Desertasi 2010) lihat buku Moh. Mahfud MD. 1998 *Politik Hukum di Indonesia* cet. i. Jakarta, Lp3ES, h.9

³⁷ Ibnu Elmi AS *Titik taut (aanknopingspunten) kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan umum* (Desertasi, 2010) hlm 297. lihat buku Satjipto Raharjo, 1982, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm.20-21

kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memutus perkara.³⁸

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakkan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD RI tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.³⁹

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung aura nilai Pancasila dan aura nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran

³⁸ Ahmad Kamil *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012) hlm.305

³⁹ *Ibid.* h305

hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai filosofis.

Filsafat hukum sebagai sebuah refleksi sistematis tentang kenyataan hukum, secara bebas merefleksikan kenyataan hukum dengan bimbingan Pancasila sebagai falsafahnya. Kenyataan hukum harus dipikirkan sebagai realisasi dari ide hukum yang terkandung dalam filsafat Pancasila. Dalam pandangan hukum positif, selalu bertemu dengan empat bentuk aturan, yaitu aturan hukum, putusan hukum, pranata hukum, dan lembaga hukum. Lembaga hukum terpenting adalah negara. Namun harus diingat, bahwa tidak hanya kenyataan hukum yang harus direfleksikan secara sistematis, karena filsafat hukum adalah sebuah sistem terbuka yang didalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kebebasan hakim sebagai sebuah metode filosofis untuk menemukan hukum yang adil harus bekerja dalam sistematis filsafat hukum sebagai sebuah sistem terbuka yang didalamnya semua tema dan fakta terkait harus dipertimbangkan sehingga ide hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi tugas penting dari filsafat dapat terungkap dengan sistem falsafah kebebasan hakim tersebut.

Arah pertimbangan kebebasan putusan hakim yang relevan dengan permasalahan aktual yaitu, dengan kualitas putusan hakim, akan berpusat pada pembinaan pola pikir filosofis dengan memperkenalkan filsafat hermeneutika atau penafsiran hukum sebagai metode untuk memahami teks dan fakta yang komprehensif, sehingga kualitas putusan hakim selalu diawali dengan sebuah pertimbangan hukum filosofis yang merefleksikan nilai-nilai

keadilan filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Karena memang kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan atas filsafat Pancasila dan UU 1945.⁴⁰

Walaupun hakim memiliki kebebasan yang dilindungi undang-undang, tetapi tetap saja pada akhirnya hakim harus mempertimbangkan keputusannya itu apakah berdampak pada agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta pada orang yang diputuskan perkaranya.

Al-quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Al-Quran sama halnya dengan pemerintahan, hakim merupakan penegak hukum dalam mengambil keputusan, dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan untuk Maslahat Dalam Al-quran Surah An-Nisaa' [4] : ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلِوِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu **kemaslahatannya**. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

⁴⁰ Ahmad Kamil, *Fillam safat Kebebasan Hakim*, h 309

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Dalam Al-quran Surah An-Nuur ayat 49 Allah berfirman:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٤٩

Artinya: Tetapi jika keputusan itu untuk (**kemaslahatan**) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh.

2. Perceraian Bagi Anggota polri

a. Pengertian–Pengertian

1) Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut, “*talaq atau furqah*” adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian dua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah talaq dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Talaq menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talaq dalam arti khusus ialah

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..

perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.karena salah satu bentuk perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talaq.⁴²

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, dalam istilah fiqh berarti bubarnya nikah. Thalag dari kata ithlag, artinya melepas atau meninggalkan.Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.Melepas ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri.putusnya perkawinan atau perceraian.sebagaimana hukum perkawinan , hukum perceraian dalam islam kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam member hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada wanita.padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemasalakatan, yang setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. perceraian setidaknya merupakan alternative yang lebih mendidik kedua belah pihak. setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, mungkin hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan menjadi alasan bagi terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.

Walau demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. cemburu yang berlebihan

⁴²H.Wasman, Wahdah Nuroniyah, .*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama.2011, h.83

dapat menjadi sumber dari timbulnya bermacam-macam masalah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, salah satu jalan yang harus dipilih :

- a) Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
- b) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri.
- c) Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas meneruskan perceraian dan rukun kembali.

Dengan demikian, perceraian dianggap sebagai bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, perceraian adalah bencana yang diperlukan.⁴³

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan

⁴³H. Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan, perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pusaka Setia, t.t, h. 204

perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diaikat oleh tali perkawinan.

Thalaq berasal dari bahasa Arab “Ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan atau membatalkan perkawinan, Hukum asal thalaq adalah makruh atau terlarang, tetapi karena satu hal dapat menjadi haram, sunah bahkan wajib. Sedangkan thalaq yang tanpa alasan hukumnya haram. sebab hal itu dapat merusak kesucian perkawinan yang dalam agama Islam sangat tinggi nilainya. Jelas thalaq bisa wajib, sunanah, haram itu tergantung situasi dan kondisinya.

- a) Wajib, yaitu bila sudah tidak dapat diselesaikan masalahnya kecuali harus dengan jalan thalaq (perceraian).
- b) Sunnah, yaitu jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau seorang istri tidak lagi dapat menjaga kehormatannya.
- c) Haram, yaitu jika thalaq (perceraian) itu akan mendatangkan kemudharatan atau kerugian suami istri.⁴⁴

Menurut Hukum Islam bercerai pada dasarnya “terlarang” atau tidak diperbolehkan kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara’. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, mereka beralasan bahwa bercerai merupakan nikmat, karena perkawinan adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram, sehingga bercerai adalah haram kecuali darurat. Mazhab Hambali lebih lanjut menjelaskan secara terperinci mengenai hukum bercerai, yaitu:

- a) Wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak Hakam (penengah) dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut

⁴⁴ Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya, Terbit Terang, 2005, h. 501.

keputusan hakim hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan (*Syiqaq*) tersebut. begitu juga perceraian wajib dijatuhkan bagi perempuan yang diilaa' sesudah berlaku waktu menunggu 4 bulan, sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 226-227.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِن

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- b) Haram, yaitu Thalaq tanpa alasan, diharamkan kerana merugikan suami istri dan tidak adanya kemasalahatan yang akan dicapai dengan perbuatan thalaqnya tersebut.
- c) Sunnah, yaitu apabila seorang suami atau istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, sedangkan suami sitri tidak mampu memaksanya agar pasangannya menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut. ataupun apabila salah seorang dari suami atau istri mempunyai moral yang buruk dan tidak bisa berubah, maka disunahkan untuk

menceraikan pasanganya, tetapi ada juga yang berpendapat perceraian dalam hal ini hukumnya mubah.⁴⁵

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai berikut, *Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.*(HR abudaud, Ibnu Majah, dan al-Hakim).

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternative terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hukum (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dengan teknik yang diajarkan oleh Al-quran dan Al-hadist.⁴⁶

2) Pengertian Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi adalah hukum yang hidup, di mana melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi

⁴⁵Wasman, dan Wahdah Nurniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, h. 86.

⁴⁶H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.73.

kenyataan. Pekerjaan kepolisian, menurut Satipjo Raharjo dalam bukunya Muhammad Nuh yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengatakan bahwa pekerjaan penegakan hukum *in optima forma*. Pandangan ini merupakan sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum.⁴⁷

Pegawai Negeri pada polri adalah anggota Polri dan pegawai negeri Sipil (PNS) pada Polri. Peran konstruktif secara umum bagi polisi dapat diamati dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b) Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- c) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.⁴⁸

Dinamika profesi polisi tidak bisa dilepaskan dengan kuantitas dan kualitas hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi (menimpa) masyarakat. Tugas dan kewenangan polisi, seperti yang telah disebutkan dalam UU tersebut, lebih dititiktekan pada persoalan kemasyarakatan. Dengan demikian, polisi memegang kunci penting dalam memainkan peran sebagai pengayom, pendidik, dan pemberantas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa polisi mendapatkan kepercayaan untuk memperkenalkan,

⁴⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 263.

⁴⁸ *Ibid.*,

memasyarakatkan, dan member teladan praktis tentang daya imperative suatu perundang-undangan.⁴⁹

Pegawai Negeri Sipil menurut kamus umum bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata ‘ Pegawai ‘, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah perusahaan dan sebagainya, sedangkan kata ”Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintahan / Negara.

Krenenbruk memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti seperti anggota parlemen peresiden dan sebagainya, sedangkan menurut J.H.A Logimann, Pegawai negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan Negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntunganlain.⁵⁰

b. Sebab-sebab terjadinya Perceraian

Membina rumah tangga bagi anggota Polri masih didapati adanya perceraian yang terjadi karena adanya hubungan suami istri yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perceraian diantaranya:

- a) Adanya sifat kecemburuan yang berlebihan bagi istri karena sering ditinggal tugas oleh suami.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 264.

⁵⁰ muhammaad syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, h.434

- b) Adanya perselingkuhan dari pihak Suami dan Istri.
- c) Masalah ekonomi dalam Rumah tangga.
- d) Suami menginginkan tambah keturunan anak, tapi dari satu pihak tidak menyetujui.
- e) Sering terjadi pertengkaran karena beda pendapat.

Permohonan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2, undang-undang No.1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵¹

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar

⁵¹ Muhammaad syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, h.451

perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal.

Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi orang Islam, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain (sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau penganiayaan berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu perceraian itu sendiri dapat dilakukan melalui Permohonan Talak. (dari pihak suami), Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya

mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta minta diadakan sidang (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).⁵²

c. Prosedur Perceraian Bagi anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan pegawai negeri Sipil (PNS) pada Polri. Perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dengan dikeluarkan peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.⁵³

Anggota Polri dalam mengajukan perceraian ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri yaitu persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

⁵² Kompilasi Hukum Islam

⁵³Perkap Kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan,perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

- a) surat permohonan izin cerai , yang disertai alasan-alasanya.
- b) foto Kopi akta nikah.
- c) foto kartu Tanda anggota (KTA) Polri/PNS Polri.⁵⁴

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota polri yang akan melaksanakan perceraian Hal in merujuk pada pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisaian Ngara Republik Indonesia yang berbunyi” Setiap perceraian harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yan berwenang.

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai,dan rujuk yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisaian Ngara Republik Indonesia.

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah;
 - a. Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS gol IV/d dan IV/e;
 - b. De SDM Kapolri, untuk yang perpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
 - c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkunan Mabes Polri;
 - d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungannya;

⁵⁴Perkap kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri, Bandung: Citra Umbara, h.123.

- e. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS gol IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayah;
- f. Karopres, untuk yang berpangkat Brigader dan PNS golongan II ke bawah di lingkungan Mapolda;
- g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk anggota yang berpangkat Brigader dan PNS Golongan II kebawah di wilayah.

Kemudian di dalam pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) bahwa setiap pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (kepala satuan kerja) dengan melampirkan persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Kasatker sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmonisasikan kembali suami istri yang bermasalah.
- (3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh kasatker tidak berhasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.⁵⁵

Pada pasal 20 nomor 9 Peraturan Kapolri tahun 2010, Pejabat yang berwenang adalah:

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.

⁵⁵Perkap Kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, Bandung: Citra Umbara, h.127.

- (2) Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Pada pasal 21 Perkap nomor 9 tahun 2010, Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana yang dimaksud psal 20 pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.⁵⁶

Menurut pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau pegawai Negeri sipil sebagai penggugat, untuk memperoleh ijin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis, dalam surat permintaan ijin cerai atau pemberitahunya adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.⁵⁷

Tujuan izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup suami istri dan juga untuk menciptakan keseragaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap Perkap Kapolri nomer 9 tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Ngara

⁵⁶Perkap kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri, Bandung: Citra Umbara, h.128.

⁵⁷ Muhammaad syaifuddin, sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, h.453

Republik Indonesia yang melaksanakan perceraian tanpa seizin pimpinan (atasan), maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib menaati peraturan tentang disiplin anggota Polri, baik itu tentang Kewajiban, larangan dan Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Disiplin adalah Ketaatan dan Kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- e) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g) Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan tempat khusus.

Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang disiplin anggota Polri, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Pasal 4 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri adalah:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Atasan untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun;
3. Penundaan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.⁵⁸

Terhadap perceraian bagi anggota Polri yang tidak melalui izin dari atasan yang bisa diproses percerainya oleh Pengadilan Agama Palangkaraya dan sudah mendapatkan putusan cerai. Hal inilah menarik penulis untuk mengetahui tentang persyaratan perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya yang tidak sesuai dengan peraturan kapolri nomor 9 Tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa anggota yang ingin mengajukan gugat cerai harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari atasannya.

d. Proses perceraian anggota Polri di Pengadilan Agama

1) Pengertian Pengadilan Agama

Secara termonologis istilah *Peradilan* dan *pengadilan* mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Peradilan diartikan segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara;

⁵⁸ Peraturan pemerintah RI no.2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri.

mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah(bangunan) tempat mengadili perkara.

Kamus AlMunawwir Arab-Indonesia Tertangkap, hanya ditemukan kata pengadilan atau mahkamah sebagai terjemahan dari kata *al-mahkamah*, *al-qadha* dan *dar al-qadha*. Berdasarkan ensiklopedi Indonesia Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Sedangkan, istilah peradilan tidak dimukakan rumusannya. Demikian juga dalam ensiklopedi islam, hanya ditemukan istilah pengadilan agama yang dirumuskan sebagai sebuah lembaga Negara dalam struktur pemerintah republik Indonesia, yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.

Menurut ilmu hukum, pengertian peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan member keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada sesuatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan.jadi, peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang hukum tata Negara atau tata usaha Negara.

Abdul Gani Abdullah, dalam dalam desertasinya seperti dikutip Cik hasan Bisri, menjelaskan kata peradilan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum. Demi tegaknya hukum dan keadilan.

Zaini Ahmad noeh, memberikan pengertian peradilan agama sebagai terjemahan dari bahasa belanda *godsdientigerechtspraak* *godsdients* berarti Ibadah atau agama. *Recshpraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu pengadilan.kata peradilan sama rtinya dengan istilah dalam figih, yaitu *qadha dan aqdhiyah*. Sedangkan, pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan: yakni majlis hukum atau mahkamah. Oleh karena itu pengadilan agama sering disebut juga mahkamah syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syarak.⁵⁹

Hukum acara peradilan Agama dalam gugatan/ pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau pemohon , ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus.

a) Syarat Kelengkapan Umum.

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima didaftarkannya suatu perkara di pengadilan ialah:

- (a) Surat gugatan atau pemohon tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatn pemohon.
- (b) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domecilie bagi penggugat atau pemohon.
- (c) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miskin dari lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

⁵⁹A.Rahmat Rosyadi,M Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h.146.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal di atas sudah terpenuhi, Pengadilan secara Formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.⁶⁰

i. Syarat kelengkapan Khusus

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu an sich.

Contoh sebagai berikut:

- (a) Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersebjata Repubik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin dan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.
- (b) Mereka yang mau kawin lebih dari seorang(selain Anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil) harus melampirkan:
- (c) Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
- (d) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya dan atau harta yang dijadikan usaha dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristri lebih dari seorang,
- (e) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil erhadap isri atau istrinya dan anak-anannya.
- (f) Untuk keperluan diatas b, di atas, jika mau bercerai, kalau suami itu pegawai negeri Sipil.maka syarat tersebut di b, harus ditambah lagi dengan adanya izin dari Pejabat yang berwenag (Atasanya).

⁶⁰H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990, h. 66.

- (g) Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan Kutipan Akta Nikah, seperti gugatan cerai, permohonan untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, gugatan nafkah istrinya dan sebagainya.
- (h) Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan Kutipan Akta Cerai, seperti perkara gugatan nafkah, idah, gugatan tentang mut' (pemberian dari suami kepada bekas istri yang diceraikan berhubung kehendak cerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.
- (i) Mereka yang hendak cerai harus melampirkan surat keterangan hendak bercerai dari Kelurahan /Kepala desa masing-masing yang disebut model "Tra"
- (j) Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain-lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi), misalnya seorang Pegawai Negeri sipil mau bercerai maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir c,d dan f. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir a,d. Dan f.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang(atasanya).⁶¹

2). Proses perceraian di Pengadilan Agama

⁶¹*Ibid.*, h.68.

Hukum acara peradilan Agama dalam gugatan/ pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau pemohon, ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus.

1. Syarat Kelengkapan Umum.

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima didaftarkan suatu perkara di pengadilan ialah:

- (a) Surat gugatan atau pemohon tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan pemohon.
- (b) Keterangan kependudukan/tempat tinggal/domicilie bagi penggugat atau pemohon.
- (c) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miskin dari lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal di atas sudah terpenuhi, Pengadilan secara Formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.⁶²

2. Syarat kelengkapan Khusus

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu sendiri. Contoh sebagai berikut:

⁶²*Ibid.*, h.66

- (a) Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersejata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin dan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.
- (b) Mereka yang mau kawin lebih dari seorang(selain Anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil) harus melampirkan:
- (c) Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
- (d) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya dan atau harta yang dijadikan usaha dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristri lebih dari seorang,
- (e) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri atau istrinya dan anak-anaknya.
- (f) Untuk keperluan diatas b, di atas, jika mau bercerai, kalau suami itu pegawai negeri Sipil.maka syarat tersebut di b, harus ditambah lagi dengan adanya izin dari Pejabat yang berwenang (Atasannya).
- (g) Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan Kutipan Akta Nikah, seperti gugatan cerai,permohonan untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, gugatan nafkah istrinya dan sebagainya.
- (h) Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan Kutipan Akta Cerai , seperti perkara gugatan nafkah, idah, gugatan tentang mut'(pemeberian dari suami kepada bekas istri yang diceraikan berhubung kehendak cerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.

- (i) Mereka yang hendak cerai harus melampirkan surat keterangan hendak bercerai dari Kelurahan /Kepala desa masing-masing yang disebut model “Tra”.
- (j) Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain-lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi), misalnya seorang Pegawai Negeri sipil mau bercerai maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir c,d dan f. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir a,d. Dan f.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang(atasanya).⁶³

Penyelesaian perkara harus sudah selesai dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi sesuai dengan surat edaran nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yaitu; Bahwa perkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan termasuk minutasi, yaitu Perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara kecuali karena sifat dan keadaanya perkaranya lebih dari 6 bulan, dengan ketentuan Ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tingkat banding.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, h. 68.

⁶⁴ HM.Fauzan, *pokok-pokok Hukum acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, kencana prenada Media grup.2013, h.194

b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian

Pada literatur pengetahuan hukum dikenal istilah pengadilan Islam dan pengadilan agama. Pengadilan Islam meliputi pengadilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Adapun Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam di Indonesia, artinya pengadilan agama merupakan sebutan untuk pengadilan Islam yang ada di Indonesia.⁶⁵

Hukum acara pengadilan agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban perdata materiil yang diatur dalam lingkungan pengadilan agama.⁶⁶ Ketentuan hukum acara pengadilan agama sekarang secara besar bersumber pada dua aturan yaitu:

- 1) UU No. 7 Tahun 1989.
- 2) Ketetapan yang berlaku di lingkungan pengadilan umum.⁶⁷

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c) Wakaf dan sedekah.⁶⁸

⁶⁵Zulkarnaen dan Dewi Mayangsari, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 49.

⁶⁶*Ibid.*, h. 74.

⁶⁷*Ibid.*, h. 76-77.

Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atur oleh Undang-Undang.⁶⁹

Adapun kedudukan kewenangan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama, pengadilan tinggi agama pada tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Pengadilan agama pada tingkat pertama meliputi daerah Kabupaten/Kota, dan pengadilan agama pada tingkat banding meliputi daerah Provinsi. Adapun Mahkamah Agung sebagai puncak badan pengadilan Indonesia mengadili perkara kasasi di seluruh wilayah Indonesia.⁷⁰

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama harus mengacu berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Oleh karena itu, hukum acara peradilan agama

⁶⁸*Ibid.*, h. 77.

⁶⁹M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 1,

⁷⁰Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 78.

menjadi konkret dan peradilan agama dalam hukum acaranya harus memerhatikan UU No.7 Tahun 1989 serta hukum proses menurut Islam. Hal inilah yang dinamakan sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia, juga merupakan sebagai kedudukan kewenangan hukum sebagai badan pengadilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁷¹

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis harus mulai beberapa tahap berikut ini :

Tahap pertama

Melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian bisa timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon termohon. hakim harus secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. bila berhasil hakim mendamaikan atas kesepakatan para pihak hakim menunjuk mediator dari hakim atau orang lain, bila mediasi tidak berhasil, dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Pada sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pasal 8 ayat 1 perma nomor 1 tahun 2008.

Tahapan kedua

Sebelum membacakan surat gugatan, majlis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi, kemudian pembacaan surat gugatan.

Tahapan ketiga

⁷¹*Ibid.*, h. 77-78.

Jawaban tergugat/termohon, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majlis hakim dalam persidangan.

Tahapan keempat

Replik dari penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali atas gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon.

Tahapan kelima

Duplik dari tergugat/termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat/pemohon, replik dan duplik dapat di ulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik.

Tahapan keenam

Tahapan pembuktian, pengugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. demikian juga sebaliknya tergugat/termohon juga mengajukan bukti-bukti untuk mendukung jawaban/sanggahan.

Tahapan ketujuh

Tahapan kesimpulan, masing-masing penggugat dan tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Tahapan delapan

Tahapan putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara dan menyimpulkan dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.⁷²

⁷² H.ahmad fathoni, administrasi Peradilan Agama, CVmandar maju 2013.h.73

B. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu yang sejenis bertujuan untuk mengetahui secara sungguh-sungguh tentang apa yang telah diketahui dalam bidang yang akan diteliti. Adapun beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Drs. Herman Supriyadi (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun-PTA Jambi) tahun 2014 dengan judul tentang Ijin Perceraian Bagi anggota TNI/POLRI. disimpulkan bahwa besarnya dampak negatif dari suatu perceraian sangat disadari oleh semua kalangan, oleh karenanya agar perceraian yang dilakukan benar-benar telah memenuhi norma-norma agama, pemerintah melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) dan pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain aturan tersebut khusus bagi aparatur negara ditambah lagi dengan aturan “wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat” Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomo 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya TNI) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. 3 Perpang/11/VII/2007, sedangkan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

nomor 9 tahun 2010. Perbedaan peraturan-peraturan tersebut di atas pada dasarnya hanyalah mengenai limit ataupun tenggang waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang atasan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 5 ayat (2) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 12 limit atau tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus izin yang dimaksud disebutkan dengan tegas yaitu 3 bulan, sebaliknya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 limit atau tenggang waktu yang dimaksud tidak diatur sama sekali.

2. Nuretina wulandari Pengaturan Perkawinan dan perceraian bagi anggota sebagai Pegawai Negeri Pada Polri ditinjau Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tahun 2009. disimpulkan bahwa sejauh mana peraturan yang mengatur secara Kusus bagi anggota Polri yang akan melaksanakan Perkawinan dan perceraian, sudah sesuai dengan peraturan Undang-undangan Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sanksi apa yang akan dikenakan pada pelanggaran peraturan tersebut bagi anggota Polri.
3. Danu Altriara 2011, Motif dan Akibat Perceraian dikalangan Kepolisian jajaran Sektor Kuantan Mundik ditinjau Hukum Islam. disimpulkan bahwa Motif perceraian bagi anggota Kuantan Mudik dan akibat perceraian itu sendiri terhadap keluarga, terhadap Kepolisian. Analisis Hukum Islam tentang motif dan akibat perceraian dari hasil penelitian didapati, bahwa penugasan bagi anggota langsung berhubungan dengan kejahatan dan kemaksiatan, sedikit banyak merubah pola pikir, prilaku dan sikap bagi anggota itu sendiri. anggota

kepolisian bercerai engan melaporkan perceraian mereka, mengurus perceraian dan perceraian tidak dilakukan dihadapan hakim.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif tentang Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK, yang mengarah pada pemahaman lebih luas tentang bagaimana cara bagi anggota Polri melaksanakan pengajuan perceraian di pengadilan agama Palangkaraya. Data yang diperoleh berupa informasi, keterangan dan hasil-hasil pengamatan lainnya tentang Perceraian bagi Anggota Polri Polda Kalteng di Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara lengkap, sistematis dan faktual tentang perceraian anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan deskriptif tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap suatu perlakuan, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya

menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁷³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*Case Study*). peneliti mencoba mencermati individu secara mendalam dan rinci mengenai perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017//PA.PLK.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data Primer yaitu data yang akan digali berasal langsung dari informan. dalam pelaksanaan perceraian anggota polri, informasi akan digali langsung dari personel Polri yang bertugas mengurus masalah perceraian bagi anggota Polri di Bagwatpres Boro SDM Polda Kalteng dan Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Data Skunder yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian, buku-buku tersebut akan dikaji dan ditelaah kemudian dijadikan bahan tambahan informasi.

2. Sumber Data

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah semua personil Polri dan Pegawai Pengadilan agama Palangkaraya yang memberikan informasi untuk kelengkapan data yang

⁷³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 5.

diperlukan, Dalam penelitian ini dokumen juga dijadikan sumber data, mengingat Polda Kalteng dan Pengadilan Agama Palangkaraya adalah lembaga/instansi resmi, tentunya data yang sudah tertulis dan lebih-lebih telah terpublikasi akan memiliki nilai kevalidan dan derajat keformalan lebih tinggi. Baik data tersebut mengenai anggota yang melakukan perceraian yang sesuai prosedur yang meminta izin dari pimpinan /atasanya dan tidak sesuai prosedur, langsung anggota polri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama palangkaraya. Kemudian sumber data tersebut dilengkapi dengan wawancara dan observasi lapangan. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yakni manusia dan dokumen.

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, peneliti terjun di lokasi untuk mengadakan wawancara langsung dengan para responden yaitu personel yang bertugas di Bagwatpres Biro SDM Polda Kalteng dan juga pegawai di Pengadilan Agama Palangka Raya.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, data diperoleh melalui tiga cara, yaitu (1) Observasi, (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), (3) Studi dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu, teknik dokumentasi berupa bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek untuk melengkapi data yang diperlukan.

Prosedur pengumpulan data ada 5 orang informan baik dari anggota Biro SDM Polda Kalteng dan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya

yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi tentang cara Perceraian bagi Anggota Polri Polda Kalteng di Pengadilan Agama Palangka Raya:

1. Observasi, dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data mengenai perceraian bagi Anggota Polri. Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya tidak mengikuti pola pengamatan berstruktur yaitu kegiatan pengamatan dengan mencatat atau merekam keadaan sesuai dengan focus penelitian, tanpa terikat pada daftar tertentu, dan subjek terteliti tidak dikondisikan sebelumnya, melainkan diamati pada latar alami.
2. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁴ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka/tidak terstruktur namun mengarah, hal ini dimaksudkan agar subjek yang diteliti dapat memberikan informasi sebanyak mungkin serta dapat mengemukakan pendapat, ide-ide seluas dan sebebaskan mungkin.
3. Dokumentasi hasil putusan pengadilan agama palangka raya bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat mengecek kesesuaian data secara triangulasi, selanjutnya analisis

⁷⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), cet. 21, h. 186.

dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi langsung dari Pengadilan Agama Palangka Raya.

D. Analisis Data

Keseluruhan proses pengumpulan data dan penganalisisan data ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷⁵

1. Reduksi data, dalam reduksi data ini, peneliti memilih, menyederhanakan dan memindahkan data yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan, baik data yang didapat melalui hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan focus penelitian yaitu Perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai Nomor :0110/AC/2017//PA.PLK Tanggal 5 April 2017.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini, peneliti menyajikan sekumpulan informasi/data secara tersusun dan mengorganisasikan data yang diperoleh sebelumnya mengenai Perceraian bagi anggota polri di Pengadilan Agama Palangkaraya.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, ini merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga bisa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Setelah melakukan beberapa tinjauan analisis di atas, penelitian ini juga dianalisis melalui hukum Islam baik dari segi Ushul fiqih teori maslahat ataupun melalui Kaidah-kaidah Fikih. Hal ini berguna sebagai jalan bentuk dari hasil

⁷⁵Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta; UI. Press, 1992), h. 16.

penelitian di mana perceraian anggota Polri yang tidak sesuai Prosedur di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya sesuai dengan kemaslahatan atau mendatangkan kemudharatan dengan bertitik dari kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak sesuatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.⁷⁶

E. Pengecekan Keabsaha Data

Penelitian kualitatif pengecekan keabsahan temuan harus dilakukan sejak awal pengambilan data dan melalui tiga tahap. Tiap-tiap tahap terdiri dari kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap tahapan adalah: (1) Orientasi, (2) Ekplorasi, dan (3) Membercheck.⁷⁷

1. Tahap Orientasi

Tahapan ini dilakukan prasurevey ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti. Pada tahap ini penulis menentukan subjek awal, melakukan pendalaman melalui sumber-sumber bacaan baik konsep teoritis maupun studi pendahuluan yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta memilih lokasi penelitian.

2. Tahap Eksplorasi

Tahap ini dilakukan penelitian lapangan terhadap sumber data tentang Perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Study

⁷⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

⁷⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 33.

Kasus Putusan Akta Cerai Nomor :0110/AC/2017//PA.PLK Tanggal 5 April 2017 guna mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan.

3. Tahap Membercheck

Tahap ini membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada responden guna menilai dengan hasil wawancara, penilaian dokumen dan observasi, kemudian meminta penjelasan kepada unsur-unsur terkait bila dipandang perlu jika data dan informasi yang dikumpulkan belum lengkap. Hal ini dimaksudkan agar seluruh data yang diperoleh dapat dijamin kebenaran tanpa keraguan akan validitasnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Polda Kalimantan Tengah

a. Sejarah singkat berdirinya Polda Kalteng

Seiring berjalannya waktu, organisasi POLRI sering kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintah RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, dimana penyelenggaraan negara menganut paradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar POLRI mandiri. Kemandirian POLRI yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999, untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat yang menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera, bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup yang berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Dalam perjalanannya Polda Kalimantan Tengah mengalami berbagai perubahan, pada tanggal 17 September 1958 telah dibentuk Polda dengan nama KOMDAK XII KALTENG (Komando Daerah Kepolisian XII) yang kepemimpinannya dijabat oleh :

1. KBP R. G. Rawirosastro.

- 2.KBP Drs. Oetarman
- 3.KBP Drs. S.Soradjo.
- 4.KBP Drs. Srimardji.
- 5.KBP Drs. Murjono.
- 6.KBP Drs. Sosrosusatio.
- 7.KBP R. Soenarto.
- 8.Kol. Pol. Drs. Rahardjo.

Berdasarkan keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/B/13/IV/1974 tanggal 25 April 1974 Komdak XII KALTENG yang telah mengalami likuidasi atau perubahan yaitu Komdak XII KALTENG digabungkan Komdak Kalsel yang pada waktu itu telah diberi nama Komdak XII Kalimantan Tenggara (Kalra), sedangkan untuk Komdak XII Kalteng menjadi Kowil 131 KALTENG yang ditandai dengan sebuah monumen Pengabdian Insan Bhayangkara yang didirikan didepan halaman Markas Komando dan monumen tersebut diresmikan tanggal 18 Mei 1975 masa kepemimpinannya adalah :

- 1.Kol. Pol. Drs. Soegiyarto (1974-1976).
- 2.Kol. Pol. Drs. Wahono Prijodarmardjo (1976-1978).
- 3.Kol. Pol. Drs. Harsono (1978-1980)
- 4.Letkol Pol. (Pjs) Siswo Pratom (1980-1981).
- 5.Kol.Pol. W.C.W Hengz (1981-1983).
- 6.Kol. Pol. Drs. Soebagio (1983-1985).
- 7.Kol. Pol. Drs.Salim Siregar (1985-1987).
- 8.Kol. Pol. Drs.Triwibowo. S (1987-1989).
- 9.Kol.Pol.Drs.I.Wayan Madja (1990-1993)

10. Kol.Pol.Drs. Yun Mulyana (1993-1995).

Berdasarkan Keputusan Panglima ABRI No. Kep/06/V/1994 tanggal 10 Mei 1994 tentang pembentukan dan pengesahan POLDA KALSEL dan POLDA KALTENG, dengan demikian pada Polwil KALTENG berubah menjadi POLDA lagi yaitu POLDA KELTENG, yang diresmikan secara syah pada tanggal 22 Maret 1995 dan sejak dibentuknya kembali POLDA KALTENG yang menjabat sebagai KAPOLDA KALTENG hingga sekarang adalah :

- 1.Kol. Pol. Drs. Deddi Gandrijadi. G (1995-1996).
- 2.Kol. Pol. Drs. Iswimmach Rosis. (1996-1999).
- 3.Kol. Pol. Drs. Budi Machmudi, SH (1999-1999).
- 4.Kol. Pol. Drs. Bugis M. Saman, SH (1999-2001).
- 5.Brigjen. Pol. Bambang Pranoto, SH (2001-2001).
- 6.Brigjen. Pol. Drs. Lodewyk, SH (2001-2002).
- 7.Brigjen. Pol. Drs. H.Ramli Darwis. (2002-2004).
- 8.Brigjen. Pol. Drs. Ardjunan Walan (2004-2006).
- 9.Brigjen. Pol. Drs. Dinar, SH, MBA.(2006-2008).
10. Brigjen. Pol. Drs. Syamsurizal (2008-2009)
11. Brigjen. Pol. Drs. H. Damianus Jackie (2009-2012)
12. Brigjen. Pol. Drs.Nachtiar H.Tambunan (2012 - 2013)
13. Brigjen. Pol. Drs.Joko Mukti Haryono (2013-2013)
14. Brigjen. Pol. Drs.Bambang Hermanu (2013-2015)
15. Brigjen. Pol. Drs.Fahrizal (2015 - 2016)
16. Irjen. Pol. Drs. Anang Revandoko (2016 sampai sekarang)

Sebagaimana wilayah-wilayah lain di Indonesia bahwa nuansa reformasi membawa dampak pemakaran di beberapa daerah, dimekarkannya daerah menjadi kabupaten baru secara otomatis menambah satuan kewilayahan sejajar Polres, oleh karenanya saat ini wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah meliputi 14 Kabupaten/Kota, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Untuk melaksanakan perannya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, Polda Kalimantan Tengah diperkuat oleh 14 Satuan Kewilayahan setingkat Polres yang terdiri dari Polres Palangka Raya, Polres Gunung Mas, Polres Kapuas, Polres Pulang Pisau, Polres Barito Selatan, Polres Barito Timur, Polres Barito Utara, Polres Murung Raya, Polres Kotawaringin Timur, Polres Kotawaringin Barat, Polres Katingan, Polres Seruyan, Polres Lamandau dan Polres Sukamara.

Organisasi Polda Kalimantan Tengah saat ini didukung oleh kekuatan riil personil sebanyak 6.192 orang yang terdiri dari Polri berjumlah 5.983 orang dan PNS Polri berjumlah 209 orang (data biro pers per Agustus 2018), yang tersebar di satuan kerja Polda, 14 Polres dan 93 Polsek di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Diulang tahun Polri yang ke 72 tanggal 1 Juli 2018 ini dengan tema : Dengang Semangat Promoter Polri Siap mengamaankan Agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019, bertepatan dengan usia Polda Kalteng 23 tahun, maka

seiring dengan rencana Strategis Polri tahap III (2016-2025) untuk membangun Kemampuan pelayanan Publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice polri, profesionalis SDM. dalam hal ini Polda Kalteng merupakan salah satu badan Publik membangun kemitraan dan jaringan bukan hanya terbatas antara instansi terkait saja namun menjalin hubungan keterbukaan terhadap semua elemen masyarakat, disamping untuk menjamin rasa aman juga untuk meraih kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan kejujuran, menyadari akan tantangan tugas yang semakin berat kedepan.

b. Visi dan Misi Polda Kalteng

a). Visi Polda Kalteng

Visi Polda Kalteng adalah terwujudnya pelayanan kamtibmas kondusif, penegakan hukum yang tegas terukur dan membangun kerjasama kemitraan proaktif dengan penataan substansi visi tersebut di atas dapat diberikan penjelasan satu persatu sebagai berikut :

a) Terwujudnya pelayanan kamtibmas kondusif Adalah pelayanan yang dilakukan oleh Polda Kalteng dalam mewujudkan keadaan dalam masyarakat di mana tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan karena Polisi dapat membantu secepatnya bila terjadi gangguan pada masyarakat dengan standar *Quick Wins*.

b) Penegakan Hukum yang tegas terukur

Adalah pelaksanaan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum dimana Polri dengan tingkat profesionalisme yang lebih baik, bermoral, dan modern serta menjunjung tinggi hak asasi manusia mampu menciptakan suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimana

supremasi Hukum dijunjung tinggi untuk mencapai suatu keadilan dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dijalankan secara teratur, tertib dan adil dalam lindungan payung hukum yang berwibawa, tegas, humanis dan tidak diskriminatif.

c) Membangun kerjasama kemitraan proaktif

Adalah kerjasama yang dibangun oleh Polda Kalteng secara proaktif, protagonis, dan humas antar unsure komponen aparatur Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi gangguan yang mendendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.

b) Misi Polda Kalteng

- a) Meningkatkan Kemampuan Intelijen sebagai basis deteksi dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan pengamanan, dan penggalangan dalam rangka mewujudkan pemeliharaan Keamanan di wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, tanggap / responsive meliputi aspek *Security, Safety dan Peace* sehingga masyarakat Kalimantan Tengah terbebas dari gangguan fisik maupun tekanan psikis;
- c) Menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dalam menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

- d) Harkamtibnas dengan tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai kearifan local yang berlaku di masyarakat Kalimantan Tengah, serta dapat memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan Kamtibnas di lingkungan masing-masing;
- e) Menempatkan Personal Polri (Polmas) pada setiap kelurahan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai upaya *Proactive Policing*, dan dengan lebih mengedepankan upaya pencegahan dini sehingga dapat mengurangi resiko yang dihadapi daripada menanggulangi kejahatan setelah terjadi;
- f) Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana secara Professional, Objektif, Proporsional, Transparan dan Akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g)Memantapkan pengelolaan keuangan dalam penggunaan, pertanggungjawaban serta system pelaporan guna mendukung kegiatan operasional Polda Kalteng yang lebih Profesional, Transfaran dan Akuntabel;
- h) Meningkatkan kerjasama antar unsur komponen aparaturnegara dan masyarat dalam mencegah gangguan keamanan dan pemecahan masalah untuk mendukung tugas Kepolisian;

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

Sesuai UU No. 5/2002 Kalteng dimekarkan menjadi

1 Kota 13 Kab:

129 Kecamatan,

81 Kademangan,

133 Kelurahan

1.343 Desa



STRUKTUR POLDA KALTENG

POLDA TYPE A

UNSUR PIMPINAN

KAPOLDA ★★
WAKAPOLDA ★

UNSUR PENGAWASAN DAN PEMBANTU PIMPINAN



UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK



UNSUR PENDUKUNG



UNSUR PELAKSANA TINGKAT KEWILAYAHAN

POLRES

Dalam pelaksanaan Tugas di Polda Kalteng di pimpin oleh Kapolda Kalteng dan dibantu oleh Para Pejabat Utama diantaranya adalah WakaPolda, Irwasda, Para Karo, Para Dir, Para kabid dan kapolres jajaran Polda Kalteng.

Dalam bidang perceraian bagi anggota Polri yang kewenangan masalah perceraian anggota pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Biro Sumber daya manusia Polda Kalteng.

Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya Biro SDM Polda Kalteng menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel;
- b. pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan;
- c. pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel;
- d. pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel; dan
- e. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.

Biro SDM Polda Kalteng dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Biro SDM Polda Kalteng terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers);
3. Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar);
4. Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers); dan
5. Bagian Psikologi (Bagpsi).

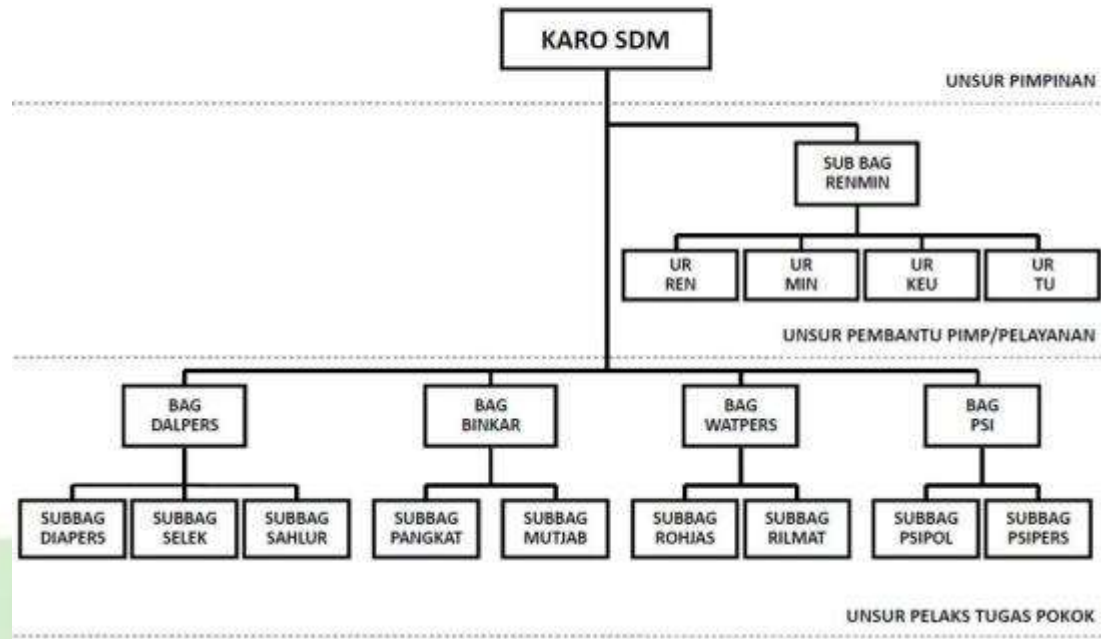
Visi sdm polri :

Menggelar personel polri yang profesional, bermoral dan modern pada sentra-sentra kegiatan masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima

Misi sdm polri :

1. Membangun dan menyiapkan sistem bin sdm sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dinamis
2. Menyiapkan kekuatan sdm polri selaku pengemban diskresi kepolisian dan menggelar pada sentra-sentra kegiatan masyarakat
3. Membangun infra struktur yang efektif untuk menyiapkan, mengembangkan dan memelihara sdm polri
4. Membangun budaya kelembagaan (corporate culture) yang bertumpu pada budaya pelayanan masyarakat
5. Memperjuangkan hak-hak anggota polri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

STRUKTUR ORGANISASI RO SDM



Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ro SDM. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
5. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

6. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran; dan
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang SDM di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin dibantu oleh:

1. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang SDM di lingkungan Polda;
2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Bagdalpers bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, yang meliputi penyelenggaraan penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagdalpers menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Brigadir, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akademi Kepolisian (Akp) dan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS), dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa);
2. penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen),

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), serta pendaftaran Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);

3. pelaksanaan seleksi dan penerimaan Sekolah Alih Golongan (SAG); dan
4. pelayanan kegiatan proses administrasi penerbitan pengesahan dan penyaluran pengakhiran dinas bagi anggota dan PNS Polri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagdalpers dibantu oleh:

1. Subbagian Penyediaan Personel (Subbagdiapers), yang bertugas melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota dan PNS Polri;
2. Subbagian Seleksi (Subbaglek), yang bertugas melaksanakan kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri; dan
3. Subbagian Pemisahan Penyaluran (Subbagsahlur), yang bertugas melaksanakan kegiatan proses administrasi pengakhiran dinas baik bagi anggota dan PNS Polri.

Bagbinkar bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi pelaksanaan asesmen, mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya. Bagbinkar menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan karier personel proses Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) untuk anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk PNS Polri, serta penyempahan pangkat SAG;
2. pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan;
3. pembinaan dan pengembangan kompetensi personel melalui pendekatan manajemen SDM; dan

4. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagbinkar dibantu oleh:

1. Subbagian Kepangkatan (Subbagpangkat), yang bertugas menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel meliputi proses UKP dan penyempuhan pangkat SAG; dan
2. Subbagian Mutasi dan Jabatan (Subbagmutjab), yang bertugas menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

Bagwatpers bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan kesejahteraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani, jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personel; dan membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagwatpers menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kesejahteraan personel; dan
2. pelaksanaan kegiatan pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagwatpers dibantu oleh:

1. Subbagian Rohani dan Jasmani (Subbagrohjas), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan PNS Polri meliputi pembinaan mental, rohani dan jasmani secara berkala, serta pembinaan keluarga bahagia; dan

2. Subbagian Moril dan Kehormatan (Subbagrilmat), yang bertugas mengusulkan dan menyarankan tanda kehormatan dan tanda penghargaan anggota dan PNS Polri, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri.

Bagpsi bertugas membina dan melaksanakan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung pelaksanaan tugas operasi kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagpsi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan psikologi kepolisian dan personel untuk mendukung tugas operasi kepolisian. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagpsi dibantu oleh:

1. Subbagian Psikologi Kepolisian (Subbagpsipol), yang bertugas menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan
 2. Subbagian Psikologi Personel (Subbagpsipers), yang bertugas menyelenggarakan psikologi personel.⁷⁸
2. Gambaran Pengadilan Agama Palangka Raya
 - a. Sejarah singkat Pengadilan Palangka Raya

Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.

⁷⁸.Perkap kapolri nomor 23 Tahun 2003 Tetang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pada tingkat Polda

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA,

kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun – tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer.

Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya

2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

3. Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegakkan keadilan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air

kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syari'ah". Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a) Bank Syari'ah;
- b) Lembaga Keuangan Makro Syari'ah;
- c) Asuransi Syari'ah;
- d) Reasuransi Syari'ah;
- e) Reksadana Syari'ah
- f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
- g) Sekuritas Syari'ah;
- h) Pembiayaan Syari'ah;
- i) Pegadaian Syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
- k) Bisnis Syari'ah.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

a) Visi Pengadilan Agama Palangka Raya

Visi Pengadilan Agama Palangka raya

Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai Visi yaitu :

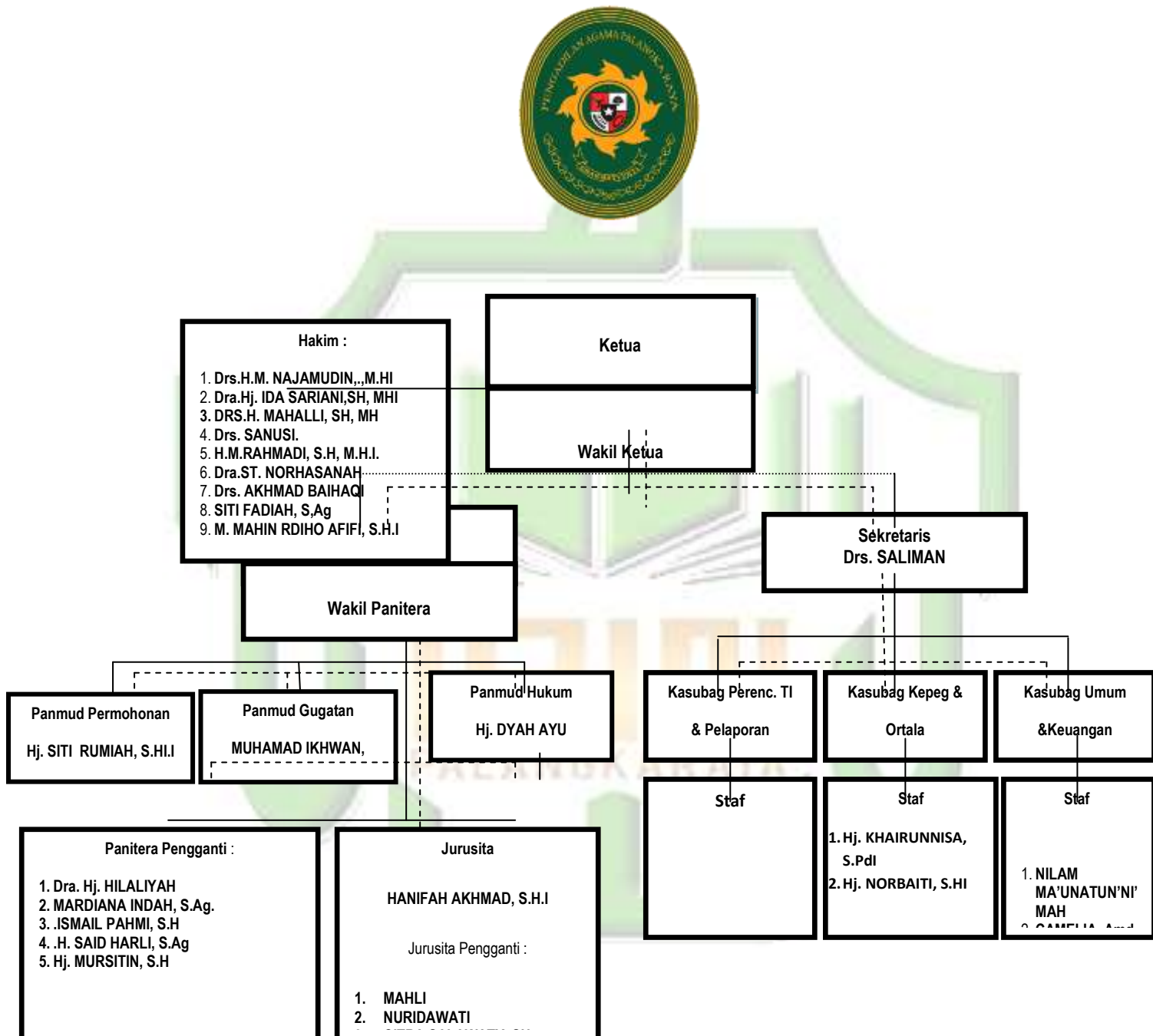
” Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung”

b) Misi Pengadilan Agama Palangka raya

Misi pengadilan Agama palangka raya yaitu:

- a. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negative pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan agama palangka raya Yang bersih dari perbatan kolusi, korupsi dan Nepotesmi;
- d. Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Palangka Raya yang hadal, professional dan bermoral.

c) Stuktur Organisasi Pengadilan Palangka Raya


STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

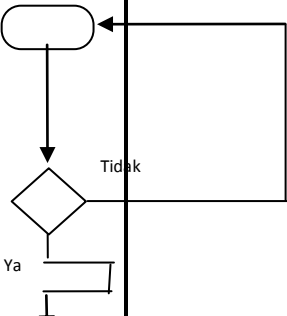
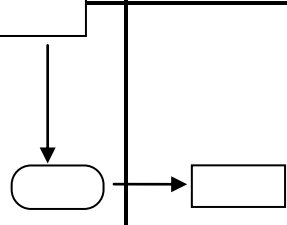
d). **Standar Operasional Prosedur (SOP)**


Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035 dalam rangka mencapai Visi yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan Misi yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan serta Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan, maka perlu suatu acuan atau standar dalam hal pelayanan. Untuk itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan dan seharusnya diselesaikan sebagaimana tahapan-tahapan yang dibuat dalam SOP tersebut guna mewujudkan *good governance*.



SOP PENERIMAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

	PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA JL. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp.	Nomor SOP	01/SOP-PA.PLK/2014
		Tanggal Pembuatan	7 Mei 2014
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Juni 2014
1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.		Kualifikasi Pelaksana :	
		1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). 2. S-1 (Hukum).	
		Peralatan/Perlengkapan :	
		Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi	
Keterkaitan :		Pencatatan dan pendataan:	


No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Meja I	Meja II	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan /gugatan, verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan perlawanan pihak ketiga			Surat gugatan /permohonan dan referensi terkait	10 menit	Catatan untuk ditindaklanjuti	
2	Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda gugatan /permohonan			Surat gugatan /permohonan dan referensi terkait	20 menit	Berkas perkara dinyatakan lengkap	
	Menentukan					Diberikannya	

 <div style="text-align: center;"> <p>PENGADILAN AGAMA</p> <p>PALANGKA RAYA</p> <p>II Kantor Besar Tondong No. 2 Telp.</p> </div>	Nomor SOP	03/SOP-PA.PLK/2014
	Tanggal Pembuatan	7 Mei 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Juni 2014

SOP PENCATATAN REGISTER PERKARA MASUK, PMH dan PHS

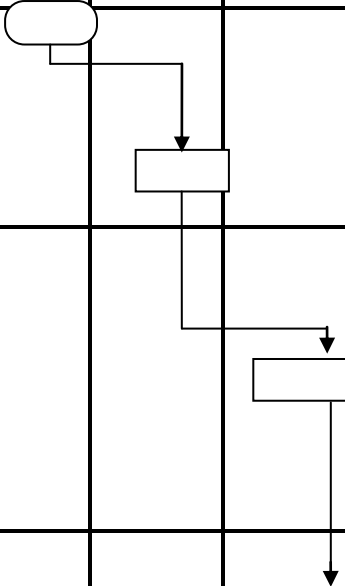
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). 2. S-1 (Hukum).
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan :	


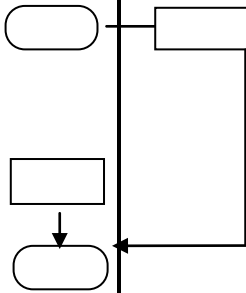
[illegible]


	PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA II. Kantor Besar Pengadilan No. 2	Nomor SOP	04/SOP-PA.PLK/2014
		Tanggal Pembuatan	7 Mei 2014
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Juni 2014

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI

Dasar Hukum : 1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.	Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). 2. S-1 (Hukum).
Keterkaitan : 	Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan : 	Pencatatan dan pendataan:

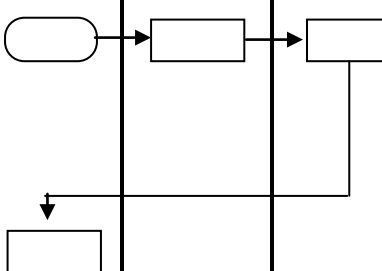
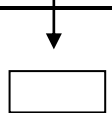

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PP	Jurusita	Kasir	Meja II	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat instrumen, mencatat nomor perkara serta menyerahkannya.					Draf/konsep, komputer dan penunjang lainnya.	25 menit	Dibuatnya instrument pemanggilan para pihak yang berperkara.
2	Membuat surat panggilan, meminta biaya pemanggilan serta melaksanakan pemanggilan					Instrumen pemanggilan, komputer dan penunjang lainnya.	20 menit	Dibuatnya relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara.
	Menerima instrumen					Instrumen pemanggilan,		Tercatatnya biaya panggilan dalam Buku Jurnal Keuangan

	PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA	Nomor SOP	05/SOP- PA.PLK/2014				
		Tanggal Pembuatan	7 Mei 2014				
SOP PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM							
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana :					
1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.		1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). 2. S-1 (Hukum) 3. S-2 (Hukum)					
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :					
Peringatan :		Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi					
Prosedur dan pelaksanaan :							
No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan perkara paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan serta melaporkan keterlambatan tersebut		Majelis Hakim dan para pihak.	6 bulan	Dimulainya persidangan pada pukul 08.00 WIB, dipanggilnya para pihak memasuki ruang sidang serta diperiksa dan diputusnya perkara.		

	PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA <small>II Kantor Besar Tondoo No. 2 Telp.</small>	Nomor SOP	06/SOP-PA.PLK/2014
		Tanggal Pembuatan	7 Mei 2014
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Juni 2014

SOP TATA CARA PERSIDANGAN

Dasar Hukum: 1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.	Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). 2. S-1 (Hukum) 3. S-2 (Hukum)
Keterkaitan : 	Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan : 	Dokumentasi dan pendataan:

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PP	Petugas Meja Informasi	Satpam /Security	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan diri sebelum persidangan, mempersilahkan para pihak mengambil nomor antri, serta memeriksa setiap orang yang dicurigai.				Nomor antrian, metal detector serta alat penunjang lainnya.	45 menit	Diberikannya nomor antrian sidang kepada para pihak.	
2	Membantu sidang, mengumumkan kepada pengunjung sidang agar tertibserta				Berkas perkara, peralatan persidangan serta alat penunjang	20 menit	Dipanggilnya para pihak untuk memasuki ruang	

B. Penyajian Data dan Analisis.

1. Latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangkaraya tanpa adanya Rekomendasi.
 - a. Belum mendapatkan ijin dari pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.⁷⁹

Untuk mengetahui hasil dari penelitian mengenai latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangkaraya tidak mendapat ijin dari pimpinan, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Subjek yang berwenang. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan SM, Pada hari Selasa 13 Agustus 2018, jam 08:00 WIB wawancara di kantor Dit Sabhara Polda Kalteng Jl. Tjilik Riwut km.6 Palangka Raya.

Anggota SM menyatakan bahwa, sebelum saya mengajukan cerai ke pengadilan Agama Palangkaraya, sebenarnya saya sudah meminta ijin ke pimpinan dan sudah membuat surat permohonan ijin cerai kepada pimpinan akan tetapi tidak mendapat respon atau di tindak lanjuti oleh pimpinan, hampir 1 tahun lebih tidak ada tindak lanjut dari pimpinan, pernah saya di panggil keruangan pimpinan pada saat itu akan tetapi pimpinan hanya mengatakan” dalam ajaran agama saya, tidak ada

⁷⁹ Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010

perceraian, yang memisahkan adalah maut atau kematian, tetapi tidak pernah memberikan solusi.

Sejak bulan maret 2015 SM sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya setelah SM mengucapkan talak, pada tanggal 18 April 2015 SM mengajukan permohonan ijin cerai kepada Dir Bimas Polda Kalteng selaku pimpinan dalam satuan kerja, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga pada tanggal 02 November 2016, SM membuat surat permohonan yang didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 3 November 2016 dengan nomor register nomor:0423/Pdt.G/2016/PA Plk. Tanpa mendapat ijin dari pimpinan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Polda Kalimantan Tengah yang melakukan perceraian tanpa seijin Pimpinan/atasan yaitu Aiptu SM, Kasubbagwatpers Biro SDM Polda Kalteng H. Budiansyah, S.Ag dan Kabagwatpres Biro SDM Polda Kalteng AKBP Drs. Suwito Hermawan, MH, bahwa subyek penelitian yang berinisial SM yang melakukan perceraian tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan pimpinan.

Dalam kaitannya dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang ingin mengajukan gugatan cerai dalam prosedurnya anggota yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri No. 9/2010”) yang berbunyi:

“Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.”

Terkait dengan ketentuan tersebut, maka pejabat Polri yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain: Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e, Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya, Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya. Selengkapnya lihat Pasal 10 Perkapolri No. 9/2010.

- b. Lamanya Respon/tindak lanjut terhadap ijin cerai yang diajukan oleh anggota Polri ke pimpinan.

Angota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang ingin mengajukan gugatan cerai dalam prosedurnya anggota yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya).

Pada tanggal 18 April 2015 anggota SM yang mempunyai permasalahan dalam keluarga, mengajukan permohonan ijin cerai kepada pimpinan Dir Bimas Polda Kalteng selaku kepala satuan kerja dimana SM berkerja, setelah surat permohonan ijin cerai diajukan dengan berbagai macam alasan secara tertulis kemeja pimpinan, namun tidak respon atau menindak lanjuti, hampir 1 tahun lebih tidak ada tindak lanjut, pernah saya di panggil keruangan pimpinan pada saat itu akan tetapi pimpinan hanya mengatakan” dalam ajaran agama saya, tidak ada perceraian, yang

memisahkan adalah maut atau kematian, hanya itu saja yang di katakan pimpinan dan tidak ada disposisi atau saran untuk di tindak lanjuti ke bagan Watpres Biro SDM Polda Kalteng yang mengurus masalah perceraian anggota polri.

Lamanya proses permohonan ijin cerai yang SM ajukan kepada pimpinan sehingga SM mengambil keputusan untuk mengajukan cerai tanpa seijin pimpinan ke Pengadilan Agama palangka Raya dengan melampirkan permohonan ijin cerai kepada pimpinan Dir Bimas Polda Kalteng, yang menyatakan untuk ijin cerai masih dalam proses.

Pada bagian analisis hasil penelitian tentang Perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka raya dalam studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK tanggal 5 april 2017. Dengan fokus bahasan yaitu perceraian anggota Polri yang tidak ada Rekomendasi/ ijin dari atasan dapat diproses di Pengadilan Agama palangka Raya sehingga mendapatkan Putusan Akta cerainya. Selanjutnya dalam analisis ini peneliti jabarkan dalam sebagaimana Latar belakang anggota polri bercerai di pengadilan agama Palangka raya yaitu Lamanya Renspon/tindak lanjut terhadap ijin cerai yang diajukan oleh anggota Polri kepada pimpinan.

Mengaju pada hasil penelitian, Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Polda Kalimantan Tengah yang melakukan perceraian tanpa seijin Pimpinan/ atasan yaitu Aiptu SM, Kasubbagwatpers Biro SDM Polda Kalteng H. Budiansyah, S.Ag dan Kabagwatpres Biro SDM Polda Kalteng AKBP Drs. Suwito Hermawan, MH, bahwa subyek penelitian

yang berinisial SM mengajukan permohonan ijin cerai kepada pimpinan, berkaitan tentang Lamanya Renspon/tindak lanjut terhadap ijin cerai yang diajukan oleh anggota Polri terhadap pimpinan.

Bagi anggota Polri sudah ada aturan yang mengatur tentang perceraian bagi anggota Polri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomo 9 Tahun 2010 tentang tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan rujuk bagi pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 Perkap nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Persyaratan dalam mengajukan permohonan ijin cerai bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagai berikut:

- Surat permohonan ijin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- Foto Kopi Akta Nikah
- Foto copy Kartu Tanda Anggota KTA) Polri/PNS Polri⁸⁰

Ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan bagi anggota polri yang akan mengajukan cerai diantaranya adalah Sebelum diajukan kebagian Perawatan Personil biro SDM Polda Kalteng anggota yang akan mengajukan cerai, membuat permohonan ke Kepala satuan Kerja masing-masing disertai alasan-alasanya, Setelah kasatker menerima pengajuan permohonan cerai anggota segera laksanakan mediasi dengan memanggil pasangan suami istri, Setelah dilakukan mediasi beberapa kali

⁸⁰ Perkap nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

tidak ada solusi untuk perbaikan maka kasatker melimpahkan ke bagian Perawatan Personel Biro SDM Polda kalteng.

Tindakan yang dilakukan oleh bagwatpers Biro SDM Polda Kalteng Yaitu Memanggil kedua belah pihak antara suami istri untuk di mintai keterangan tentang permasalahan yang dihadapi, Dilakukan pembinaan/mediasi secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali, Bila tidak berhasil merukunkan suami istri dilakukan pengambilan keterangan secara tertulis dan melaporkan ke Karo SDM untuk menindak lanjuti permohonan cerai dan untuk anggota yang berpangkat bintara tingkat Polda, surat Ijin cerai di tandatangani oleh Karo SDM Polda Kalteng.

Pasal 31 Perkapolri No. 9/2010 dinyatakan bahwa dalam hal permohonan izin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.⁸¹

Terkait dengan kebijakan seorang pimpinan atau atasan ini secara umum digambarkan oleh beberapa pakar antara lain menurut Ealau dan Pewitt bahwa kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Titmuss, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Demikian halnya dengan Edi Suharto kebijakan, suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara

⁸¹ Menurut penelitipejabat yang lebih tinggi, seharusnya sm setelah mengajukan ke kasatker Dir bimas tidak ada tindak lanjut , seharusnya mengajukan surat ijin cerainya ke bagian biro SDM Polda kalteng yang mempunyai wewenang masalah permohonan izin kawin/cerai/rujuk bagi anggota Polri.

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada 3 pendapat di atas, terkait teori kebijakan ini disertai pula pada 3 hal yang menyertainya yaitu antara lain ada Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik⁸². Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan⁸³.

Berdasarkan kajian di atas, hal ini perlu di ketahui untuk memahami setiap kebijakan yang ada tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak hal yang tersirat (kontekstual) atau relevan tetapi tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran biro SDM sebagai fasilitator untuk tranformasi informasi kepada anggota yang bermasalah antara lain dalam sengketa rumah tangganya yang mengarah pada perceraian. Tugas SDM berperan untuk menganalisis setiap masalah yang diajukan anggota gunanya untuk membantu dan membijaksanai, mencari solusi terbaik, inilah tujuan dari memahami suatu kebijakan oleh seorang pimpinan untuk di implementasi dalam mengurai permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya.

Oleh karena itu, terkait dengan kasus yang menimpa anggota polri sebagaimana uraian di atas, makata atasan seharusnya berhak menangani sebagai bagian dari kewenangan dan kekuasaanya yang berhak untuk bertindak berdasarkan kekuasaan sebagai atas untuk membuat keputusan,

⁸² Menurut peneliti yang dimaksud dengan “kegiatan politik” dalam analisis penelitian ini adalah agar tidak ada pengulangan kasus perceraian tanpa rekomendasi atasan, sebab sanksinya jelas yaitu, tidak naik pangkat, penempatan khusus, bahkan yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

⁸³ kebijakan sebagai keseimbangan, agar semua anggota polri tunduk dan patuh pada atasan yang telah diberi kewenangan menangani perizinan atau rekomendasi kepada bawahannya baik yang ingin bercerai ataupun yang akan menikah, hal ini agar terjadi keteraturan dalam institusi polri.

ataupun melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain⁸⁴ dalam hal ini pengadilan untuk menindak lanjuti permohonan perceraian, jika lembaga institusi tidak dapat melakukan mediasi mendamaikan pasangan suami-istri anggota Polri yang ingin bercerai. Menurut H.D Stout wewenang sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁸⁵ Demikian halnya Bagir Manan menggambarkan wewenang hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Namun demikian wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁸⁶ Artinya dalam kajian analisis ini menurut peneliti, sebagai anggota polri si SM berhak mengajukan haknya untuk bercerai kepada atasannya dan hal tersebut sudah dia sampaikan sebagai pentuk kepatuhan hukum di kalangan polri dengan alasan yang disampaikan, selanjutnya atasannya seharusnya dengan kewenangannya sebagai pimpinan harus berkewajiban memberikan jawaban solusi, sesuai dengan prosedur, misal dengan cara memanggil SM dan isterinya selanjutnya untuk dimintai keterangan perihal ketidak harmonisan rumah tangga, agar segera ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan berupa surat rekomendasi guna penyelesaian perkara ketidak harmonisan rumah tangga secara hukum. Hal ini peneliti gambarkan sebab dalam kajian teori kewenangan, Konteksnya dengan Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum.

⁸⁴ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35

⁸⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

⁸⁶ Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hal 26

sebab Konstitusi kepolisian merupakan bagian dari bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum, yang tidak boleh terjadi pengabaian atau pembiaran kasus yang merugikan anggota masyarakat termasuk anggota polri. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ -organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ -organ Negara tersebut harus diberikan kewenangannya sesuai dengan fungsinya.

- c. Adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri SM sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga.

Adapun yang melatar belakangi anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa adanya Rekomendasi dari pimpinan/atasan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Subjek SM yang berwenang⁸⁷. yang menjadi alasan menggugat cerai istri saya adalah istri sering mengucapkan kepada orang lain, kalau saya ini sampai saat ini tidak bisa mencintai dan menyayangi SM, saya bertahan sampai saat ini hanya karena menjalankan sebagai seorang istri, diucapkan kepada orang lain dan ditanya SM keistrinya mengakui, dihadapan orang lain menganggap saya remeh, dan tidak baik baginya dia menyepelekan merendahkan harga diri dan kehormatan suami, dia bilang saya takut sama istri, menurut sama dia, Istri pernah berselingkuh dengan tetangga dan mengakui kepada SM, Istri pernah berduaan dengan laki-laki lain di belakang gedung dan memegang kemaluan laki-laki tersebut dan sering Sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dengan Istri didalam Rumah tangga.

⁸⁷ Pada hari Selasa 13 Agustus 2018, jam 08:00 WIB peneliti melakukan wawancara di kantor Dit Sabhara Polda Kalteng Jl. Tjilik Riwut km.6 Palangka Raya

Sejak bulan maret 2015 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya setelah SM mengucapkan talak, pada tanggal 18 April 2015 SM mengajukan permohonan ijin cerai kepada Dir Bimas Polda Kalteng selaku pimpinan dalam satuan kerja, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga pada tanggal 02 November 2016, SM membuat surat permohonan yang didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 3 November 2016 dengan nomor register nomor:0423/Pdt.G/2016/PA Plk. Tanpa mendapat ijin dari pimpinan.

Mencermati kembali dari hasil wawancara dengan anggota Polda Kalimantan Tengah yang melakukan perceraian tanpa seijin Pimpinan/ atasan yaitu Aiptu SM, Kasubagwatpers Biro SDM Polda Kalteng H. Budiansyah, S.Ag dan Kabagwatpres Biro SDM Polda Kalteng AKBP Drs. Suwito Hermawan, MH.

Subyek penelitian yang bernama SM yang melakukan perceraian tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan, secara umum memberikan alasan yang melatar belakangi melakukan perceraian di pengadilan Agama Palangka raya tanpa mendapatkan rekomendasi dari atasan adalah:

1. istri sering mengucapkan kepada orang lain, kalau saya ini sampai saat ini tidak bisa mencitai dan menyayangi SM, saya bertahan sampai saat ini hanya karena menjalankan sebagai seorang istri, diucapkan kepada orang lain dan ditanya SM keistrinya mengakui.
2. dihadapan orang lain menganggap saya remeh, dan tidak baik baginya dia menyepelkan merendahkan harga diri dan kehormatan suami, dia bilang saya takut sama istri, menurut sama dia.
3. Istri pernah berselingkuh dengan tetangga dan mengakui kepada SM

4. Istri pernah berduaan dengan laki-laki lain di belakang gedung dan memegang kemaluan laki-laki tersebut.
5. Sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dengan Istri didalam Rumah tangga.
6. Karena saya sudah pernah mengajukan ijin cerai tidak pernah di tindak lanjuti oleh pimpinan, jadi yang saya pakai sebagai pengganti dari surat ijin pimpinan adalah surat permohonan cerai saya yang pernah saya ajaukan ke pimpinan.
7. Saya membuat surat pernyataan permohonan cerai talak yang menyatakan “ bahwa hingga saat ini saya belum mendapat ijin dari atasan untuk melakukan perceraian, namaun dengan ini saya menyatakan tetap mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Palangka Raya, dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko dari instansi, akaibat dari permohonan cerai talak.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa.Y dalam bukunya Hukum perceraian, Permohoan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2, undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁸

Menurut pandangan bapak H. Budiansyah, S.Ag selaku Kasubbagwatpres Biro SDM Polda Kalteng yang melatar belakangi anggota Polri Polda kalteng yang cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa mendapat rekomendasi dari atasan adalah sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan ada informasi bahwa untuk pengajuan izin cerai ditingkat satker belum selesai belum ditindak lanjuti, sehingga anggota tidak sabar dan ingin segera cerai lalu mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Tindakan dari bagian perawatan personel Biro SDM Polda Kalteng, bila ada Anggota yang cerai tanpa seijin Pimpinan adalah melakukan konfermasi dengan pengadilan Agama dan juga melayangkan surat ke Pengadilan Agama, kenapa anggota yang cerai tanpa ada surat ijin cerai dari pimpinan bisa diproses dan mendapatkan Akta Cerai, tapi kita juga menghormati hasil keputusan Pengadilan Agama, juga kordinasi dengan bidpropam karena ada pelanggaran yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan.

⁸⁸ Ibid. h.451

2. Alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari atasan

a. Kewajiban menindaklanjuti perkara oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

Hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya, Panitera pengganti dan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, mengapa pengadilan agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapat rekomendasi dari atasan.

Hukum acara peradilan Agama dalam gugatan/ permohonan harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau permohonan, ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus.

1. Syarat Kelengkapan Umum.

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima didaftarkan suatu perkara di pengadilan ialah:

- a. Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
- b. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domicilie bagi penggugat atau permohonan.
- c. Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miskin dari lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal di atas sudah terpenuhi, Pengadilan secara Formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan

selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.⁸⁹

2. Syarat Kelengkapan Khusus

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contoh sebagai berikut:

- a. Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersebjata Repubik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin dan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.
- b. Mereka yang mau kawin lebih dari seorang(selain Anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil) harus melampirkan:
 - a. Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
 - b. Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya dan atau harta yang dijadikan usaha dalam mencari nafkah atau penghasilan-pengasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebt mampu beristri lebih dari seorang,
 - c. Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil erhadap isri atau istrinya dan anak-anannya.
 - d. Untuk keperluan diatas b, di atas, jika mau bercerai, kalau suami itu pegawai negeri Sipil.maka syarat tersebut di b, harus ditambah lagi dengan adanya izin dari Pejabat yang berwenag (Atasanya).
 - e. Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan Kutipan Akta Nikah, seperti gugatan cerai,permohonan untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, gugatan nafkah istrinya dan sebagainya.

⁸⁹H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990, h. 66.

- f. Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan Kutipan Akta Cerai , seperti perkara gugatan nafkah, idah, gugatan tentang mut'(pemeberian dari suami kepada bekas istri yang diceraikan berhubung kehendak cerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.
- g. Mereka yang hendak cerai harus melampirkan surat keterangan hendak bercerai dari Kelurahan /Kepala desa masing-masing yang disebut model "Tra"
- h. Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain-lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi), misalnya seorang Pegawai Negeri sipil mau bercerai maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir c,d dan f. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir a,d. Dan f.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang(atasanya).⁹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan RS pegawai pengadilan Agama palangkaraya bagi anggota Polri atau masyarakat yang mau melakukan perceraian harus mendaftar lebih dahulu dan melampirkan persyaratanya. persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama palangkaraya adalah Foto

⁹⁰*Ibid.*, h.68.

Copy Akta Nikah sebanyak 3 lembar dan 1 diberi materai 6000 dileges kantor pos, foto Copy KTP Pemohon 3 lembar, Foto Copy Surat Izin atasan sebanyak 3 lembar dan 1 diberi materai 6000 dileges kantor pos, Surat permohonan 8 rangkap, membayar biaya perkara di Bank BNI syariah, walaupun anggota SM belum bisa melengkapi surat ijin dari pimpinan tetap kita proses sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama dan juga selalu disuruh untuk melengkapi surat ijin dari pimpinan selama proses. Selalu sampaikan untuk melengkapi persyaratan surat ijin cerai dari pimpinan, akan tetapi pemohon melampirkan surat permohonan ijin cerai kepada pimpinan yang pernah di ajukan dan menyatakan masih diproses oleh pimpinan, sehingga proses permohonan crai tetap diproses di pengadilan Agama palangka Raya ditentukan dengan model Unit yang disebut meja I, meja II dan meja III, yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu sama yang lain..

Sesuai dengan surat edaran nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yaitu Bahwa perkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan termasuk minutasi, yaitu Perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara kecuali karena sifat dan keadaanya perkaranya lebih dari 6 bulan, dengan ketentuan Ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tingkat banding.⁹¹

Menurut hakim pengadilan Agama palangka raya Muhammad,M.R Hukum acara peradilan agama adalah semua kaidah

⁹¹ HM.Fauzan, *pokok-pokok Hukum acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, kencana prenada Media grup.2013, h.194

hukum yang menentukan dan mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban perdata materiil yang diatur dalam lingkungan peradilan agama.⁹² Ketentuan hukum acara peradilan agama sekarang secara besar bersumber pada dua aturan yaitu:

- 2) UU No. 7 Tahun 1989.
- 3) Ketetapan yang berlaku di lingkungan peradilan umum.⁹³

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c) Wakaf dan sedekah.⁹⁴

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama harus mengacu berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Oleh karena itu, hukum acara peradilan agama menjadi konkret dan peradilan agama dalam hukum acaranya harus memerhatikan UU No.7 Tahun 1989 serta hukum proses menurut Islam. Hal inilah

⁹²*Ibid.*, h. 74.

⁹³*Ibid.*, h. 76-77.

⁹⁴*Ibid.*, h. 77.

yang dinamakan sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia, juga merupakan sebagai kedudukan kewenangan hukum sebagai badan pengadilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan M.MR selaku hakim dalam persidangan cerai SM tersebut, bawa dalam proses persidangan hakim tidak mempermasalahkan masalah surat ijin cerai dari pimpinan dan surat pernyataan⁹⁶ sebagai pengganti dari surat ijin dari pimpinan, karena surat persyaratan seperti Foto Copy Akte Cerai, Foto Copy KTP, surat ijin dari pimpinan itu merupakan Administrasi, bukan suatu persyaratan alasan dalam pengajuan gugat cerai seperti yang tercantum dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hakim tetap melanjutkan perkara gugat cerai sampai dengan mengeluarkan putusan perkara cerai, karena anggota SM sudah membuat pernyataan untuk tetap diproses permohonan cerainya dan sanggup menerima resiko yang di berikan oleh pimpinan/instansi dan setiap tahapan sidang selalu diingatkan untuk meminta ijin dari pimpinan/atasan.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 77-78.

⁹⁶ Menurut peneliti surat pernyataan ini adalah surat yang menjadi ganti dari surat ijin dari pimpinan yang menyatakan bahwa SM sebagai pemohon tetap minta untuk diproses perceraianya walaupun surat ijin dari pimpinan tidak ada dan sanggup menerima sanksi dari pimpinan.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁹⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, peneliti berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama di samping sebagai pegawai negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

⁹⁷Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:” Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹⁸

b. Adanya surat pernyataan pemohon.

Dalam pengajuan perceraian bagi anggota Polri ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon, Perceraian bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dengan dikeluarkan peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.⁹⁹

Anggota Polri dalam mengajukan perceraia ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai denagn pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri yaitu persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a) surat permohonan izin cerai , yang disertai alasan-alasanya.
- b) foto Kopi akta nikah.
- c) foto kartu Tanda anggota (KTA) Polri/PNS Polri.¹⁰⁰

⁹⁸ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 *tentang kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat 1

⁹⁹Perkap kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan,perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri

¹⁰⁰Perkap kapolri n.9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri, Bandung: Citra Umbara, h.123.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian Hal ini merujuk pada pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi” Setiap perceraian harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Dari hasil penelitian SM Sejak bulan maret 2015 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya setelah SM mengucapkan talak, pada tanggal 18 April 2015 SM mengajukan permohonan ijin cerai kepada Dir Bimas Polda Kalteng selaku pimpinan dalam satuan kerja, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga pada tanggal 02 November 2016, SM membuat surat permohonan yang didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 3 November 2016 dengan nomor register nomor:0423/Pdt.G/2016/PA Plk. Tanpa mendapat ijin dari pimpinan, sehingga SM membuat pernyataan permohonan cerai yang menyatakan siap menerima sanksi dari atasan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim M.MR Pada hari jumat 28 september 2018, jam 08:00 WIB di kantor Pengadilan Agama Palangka Raya bagi anggota yang melakukan perceraian tanpa seijin Pimpinan/ atasan yaitu Aiptu SM, membuat surat

pernyataan permohonan cerai tolak, bahwa hingga saat ini SM belum mendapat ijin dari atasan untuk melakukan perceraian, namun SM tetap mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Palangka Raya, dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko dari instansi, akibat dari permohonan cerai talak tersebut, dan setiap persidangan hakim selalu mengingatkan untuk mengurus surat ijin cerai ke pimpinan, dengan pertimbangan pokok permasalahan/alasan cerai inilah hakim mengabulkan permohonan cerai berdasarkan pertimbangan bahwa selain keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan, tidak ada kecocokan dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat pemohon dan termohon harus ditemukan jalan keluar dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan mafasid adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menurut Imam Al-Ghajali pada dasarnya Al-maslahah adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan, akan tetapi, bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dan mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan tujuan syara'.

Dari uraian Al-Ghajali dapat di pahami bahwa al-maslahah dalam pengertian Syar'I ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak

kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan syara'. Apabila bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan al-maslahah tetapi merupakan mafsadah.¹⁰¹

- c. Ijin perceraian sebagai Administrasi sedangkan putusan perceraian terkait masalah hukum perdata.

Dalam pemutusan perkara dalam persidangan perceraian tidak dibahas masalah surat ijin cerai dari pimpinan atau instansi, tetapi tetap di ingatkan bagi anggota polri yang bercerai belum mendapat ijin dari pimpinan tetap disarankan untuk mengurus ijin tersebut.

Permohonan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2, undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

¹⁰¹ Ibid.h.155

- f. Suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰²

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis harus mulai beberapa tahap berikut ini :

Tahap pertama melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian bisa timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon termohon. hakim harus secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. bila berhasil hakim mendamaikan atas kesepakatan para pihak hakim menunjuk mediator dari hakim atau orang lain, bila mediasi tidak berhasil, dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Pada sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pasal 8 ayat 1 perma nomor 1 tahun 2008.

Tahapan kedua sebelum membacakan surat gugatan, majlis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi, kemudian pembacaan surat gugatan.

Tahapan ketiga jawaban tergugat/termohon, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majlis hakim dalam persidangan.

¹⁰² Ibid. h.451

Tahapan keempat Replik dari penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali atas gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon.

Tahapan kelima Duplik dari tergugat/termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat/pemohon, replik dan duplik dapat di ulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik.

Tahapan keenam Tahapan pembuktian, penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat.demikian juga sebaliknya tergugat/termohon juga mengajukan bukti-bukti untuk mendukung jawaban/sanggahan.

Tahapan ketujuh Tahapan kesimpulan, masing-masing penggugat dan tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Tahapan delapan Tahapan putusan,hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara dan menyimpulkan dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.¹⁰³

Dari hasil wawancara dengan M.MR selaku hakim dalam persidangan cerai SM tersebut, Peneliti berpendapat bawa dalam proses persidangan hakim tidak mempermasalahkan masalah surat ijin crai dari pimpinan dan surat pernyataan sebagai pengganti dari surat ijin dari pimpinan, karena surat persyaratan seperti Foto Copy Akte Cerai, Foto Copy KTP, surat ijin dari pimpinan itu merupakan kepegawaian Administrasi, bukan suatu persyaratan alasan dalam pengajuan gugat cerai seperti yang tercantum dalam pasal 19

¹⁰³ H.ahmad fathoni,administrasi Peradilan Agama, CVmandar maju 2013.h.73

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam maka pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terpenuhi unsure perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, walaupun anantara pemohon dan termohon pernah pisah tempat tinggal tidak ada itikad untuk memperbaiki rumag tangganya, hal ini terbukti dari fakta selama berpisah, tidak ada saling mengunjungi walaupun tinggal berdekatan dalam satu kelurahan, begitupula dengan sikap pemohon yang bersikeras untuk bercerai dengan termohon tergambar dari sikap pemohon yang bersedia menanggung resiko akibat tidak memiliki ijin cerai dari atasan/pimpinan.dengan demikian maka keadaan rumah tangga yang idial yang diinginkan sebagai yang tertuang dalam surat ar-rum ayat 21 yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, berdasarkan pertimbangan hukum majlis hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon yakni member ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya.dan selain itu majelis hakim mengemukakan dalil – dalil oleh majilis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sehingga hakim tetap melanjutkan perkara gugat cerai sampai dengan mengeluarkan putusan perkara cerai, karena itu mutlak bukan persyaratan alasan cerai. Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dan dalam kaidah fiqiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak sesuatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*¹⁰⁴

3. Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan

a. Pelanggaran terhadap aturan peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 dapat dikenakan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi adalah hukum yang hidup, di mana melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Pekerjaan kepolisian, menurut Satipjo Raharjo dalam bukunya Muhammad Nuh yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengatakan bahwa pekerjaan penegakan hukum *in optima forma*. Pandangan ini merupakan

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum.¹⁰⁵

Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Disiplin itu mempunyai 3 aspek yaitu sebagai Sikap mental, mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak, Pemahaman yang baik mengenai sistem atauran perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan, Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hari, untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib.¹⁰⁶

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.¹⁰⁷

Dalam peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota polisi, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

¹⁰⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 263.

¹⁰⁶ Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, h. 449

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil

sebenarnya terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁸

Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010).

Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (PP No. 30/1980). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup: penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian menurut hukum bagi anggota Polri yang hendak mengajukan gugatan perceraian harus meminta izin dari atasannya terlebih dahulu. Jika perceraian dilakukan tanpa izin atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Polri.

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang disiplin anggota Polri, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Pasal 4 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin atau Kode Etik Propesi Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri adalah Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik danTindakan disiplin pada ayat (10 tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang

bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.¹⁰⁹

- b. Hak-hak anggota tidak diberikan selama masih dalam proses pelanggaran.

Menurut Anggota SM selaku pemohon perceraian banyak kerugian yang dihadapi akibat dari perceraian tanpa adanya ijin dari atasan diantaranya adalah merasa terganggu dengan masalah dinas saya hak-hak saya dicabut seperti hak untuk naik pangkat, hak untuk ikut pendidikan, hak untuk mengembangkan karier, hak Mau mengajukan nikah lagi sulit dan juga Harus menanggung pelanggaran akibat cerai tanpa ijin pimpinan baik itu berupa pelanggaran disiplin dan kode Etik Profesi Polri. Masih adanya ancaman dari istri yang menginginkan saya di pecat dari dinas kepolisian, Tidak bisa lagi berkumpul dengan anak dan Proses pelanggaran mengantung belum tahu selesai kapan.

Menurut Kabagwatpres Biro SDM Polda Kalteng SH mengenai Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan otomatis hak-haknya dalam kedinasan di cabut sampai proses pelanggaran selesai, diantaranya adalah akte cerai belum bisa digunakan untuk keperluan persyaratan nikah lagi, setelah selesai diproses pelanggaran dan mendapat hukuman yang tetap baru diproses pengajuan nikahnya, intinya diproses dulu pelanggaran baik itu nanti berupa Kode Etik Profesi Polri maupun pelanggaran disiplin, yang mana ancaman hukuman sanksi pelanggaran KKEP kode etik profesi Polri pada pasal 21 perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bisa berupa dinyatakan perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan

¹⁰⁹ Peraturan pemerintah RI no.2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri.

maupun tertulis, mengikuti pembinaan, pembebasan dari jabatan, mutasi demosi, dan PTDH. sedangkan untuk pelanggaran Disiplin sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri hukuman disiplin berupa: Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Studi kasus Putusan Akta cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 April 2017. maka melalui temuan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa adanya Rekomendasi cerai dari pimpinan adalah karena tidak segera ditindak lanjuti oleh pimpinan dengan maksud agar niat bercerai anggota polri dapat dibatalakan melalui mediasi untuk memecahkan permasalahan anggota kondisi ini menambah problemya terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istri SM sehingga menambah perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat di perbaiki atau disatukan lagi.
2. Alasan Pengadilan Agama palangka raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan adalah Pengadilan Agama Palangka Raya setiap menerima perkara gugatan dan permohonan untuk ditindak lanjuti artinya jika sudah ada surat permohonan dan sudah membayar biaya perkara, perkara sudah masuk dalam buku induk register perkara perdata sesuai dengan nomer perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan tetap ditindak lanjuti, karena rekomendasi atasan bukan persyaratan yang mutlak dalam perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun epeknya SM sanggup menerima sanksi dari kesatuan akibat dari cerai tanpa ijin dari pimpinan atau instansi dimana ia bekerja sebagai seorang polisi di Polda Kalimantan Tengah.

3. Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan adalah SM yang cerai tanpa seijin pimpinan jelas melanggar pasal 4 huruf f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2003 tentang disiplin Anggota Polri dan juga Kode Etik Propesi Polri, sehingga SM tetap tidak bisa menggunakan Akta Cerainya sebagai persyaratan untuk melaksanakan nikah lagi secara dinas dan dikenakan Pelanggaran Disiplin Atau Komisi Etik Profesi Polri, sehingga hak-haknya untuk mengembangkan Kareir di cabut oleh pimpinan seperti mau naik pangkat, pendidikan sebelum pelanggaran perkaranya selesai

B. Rekomendasi

1. Bagi anggota Polri

Bagi anggota Polri yang mengajukan permohonan cerai ditolak oleh pejabat yang berwenang , maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

2. Untuk Polda kalteng.

Di proses segera atau ditindaklanjuti jika ada anggota yang ingin mengajukan Perceraian, agar adanya MOU/kerja sama antara Polda Kalteng dan Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam hal pengajuan persyaratan Perceraian bagi anggota Polda Kalteng.

3. Untuk Pengadilan Agama Palangkaraya

Agar tidak memproses perceraian bagi Anggota Polri sebelum mendapat ijin dari pimpinan/instansi dan melakukan pemberitahuan kepada pejabat tentang permohonan perceraian anggota Polri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang dan Kewenangan

Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam, Bandung: Citra Umbara.

PP RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974. Bandung:

Citra Umbara.

PP RI nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun

1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

Bandung: Citra Umbara.

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan

perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, Bandung: Citra

Umbara.

B. Buku

Abdulullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan.perceraian Keluarga*

Muslim, Bandung: Pusaka Setia, t.t.

Al-Aziz, Moh. Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya, Terbit Terang, 2005,

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

Djazuli, A., *Kiadah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fathoni R, Ahmad, *Administrasi Pengadilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum acara Peradilan agama dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2013

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jogjakarta: UGM Pers, 2008).

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, t.t.

H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

HS, salim, Erlis ST, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Perebada Media Grup, Jakarta 2012

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta; UI. Press, 1992).

- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005).
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).
- Raysid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001).
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, (Bandung; Bina Cipta, 1987).
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

Syaifuddin, Muhammad ddk. *Hukum perceraian*, Palembang, Sinar Grafika 2012

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2006).

Wasman, dan Wahdah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, CV. Mitra Utama, 2011.

Zulkarnaen dan Dewi Mayangsari, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

